MR. I GUSTI KETUT PUDJA

Riwayat Hidup dan Pengabdiannya

aan Direktorat
Kebudayaan
0.0598
RIK
m

Oleh : Rika Umar

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

MR. I GUSTI KETUT PUDJA

Riwayat Hidup dan Pengabdiannya

Oleh : Rika Umar

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja-sama antar para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambahan sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Oktober 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang antara lain mengerjakan penulisan biografi tokoh.

Pengertian "tokoh" dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23/1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga.

Dasar pemikiran penulisan biografi tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga mengejar kepuasan bathiniah, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional di bidang budaya yang bertujuan

menimbulkan perubahan-perubahan yang diarahkan untuk membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Oktober 1986

PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
PENDAHULUAN 1
Bab I Asal-usul dan Pendidikan 6
Bab II Mewakili Sunda Kecil dalam PPKI 19
Bab III Gubernur Sunda Kecil RI Pertama 39
PENUTUP 61
DAFTAR PUSTAKA 65
DAFTAR INFORMAN 67
LAMPIRAN 68
FOTO 70

PENDAHULUAN

Penulisan biografi Tokoh Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja ini disusun dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengabadikan jasa-jasa tokoh-tokoh nasional yang telah memberikan dharma bhaktinya kepada nusa dan bangsa.

I Gusti Ketut Pudja, adalah putra kelima I Gusti Nyoman Raka Punggawa di Sakasada, Singaraja, Bali. Ia lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1908. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 1977, ia wafat di RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta dalam usia 69 tahun.

I Gusti Ketut Pudja merupakan putra Bali pertama yang memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (sarjana hukum). Dalam tahun 1935 ia telah mengabdikan dirinya pada Kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja. Tahun 1936 ia ditempatkan pada Pengadilan Negeri yang pada masa itu disebut *Raad van Kerta*.

Pada awal pendudukan Jepang, I Gusti Ketut Pudja ditugaskan untuk mengaktifkan kembali kegiatan pemerintahan sipil. Ia diangkat oleh Kapten Kanamura dari Angkatan Darat Jepang untuk menjalankan kegiatan pemerintahan keresidenan

di Singaraja sebagai *redjikan dairi*. Setelah Angkatan Darat Jepang diganti dengan Angkatan Laut Jepang, ia diangkat sebagai *giyosei komon* (penasihat umum) *cookan* (kepala pemerintahan Sunda Kecil) sampai zaman kemerdekaan.

Pada pertengahan bulan Agustus 1945, I Gusti Ketut Pudja ditunjuk untuk mewakili Sunda Kecil menghadiri rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Ia hadir di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disusun. Pada hari yang bersejarah tanggal 17 Agustus 1945, ia turut menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta.

I Gusti Ketut Pudja mengikuti secara aktif rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia turut dalam panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandardi Nata, dengan tugas menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Panitia kecil ini telah berhasil menyusun pembagian wilayah atas delapan provinsi dan juga mengusulkan pembentukan tentara kebangsaan.

Demikianlah pada tanggal 22 Agustus 1945, I Gusti Ketut Pudja diangkat oleh presiden Republik Indonesia untuk menjabat gubernur Sunda Kecil yang pada waktu itu disebut "Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Sunda Kecil". Pada tanggal 23 Agustus 1945, ia pulang ke Bali untuk memulai tugas baru.

Sebagai gubernur pertama, mulailah ia menyusun Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil. Tugas yang dipikulkan oleh pemerintah pusat kepadanya tidaklah ringan. Di samping Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil, Pemerintah Pendudukan Jepang di Sunda Kecil masih tetap berkuasa, meskipun Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Di lain pihak masih ada swapraja-swapraja yang sejak tahun 1938 diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang menetapkan daerah Bali atas delapan kerajaan.

Untuk menyatukan seluruh delapan kerajaan ini, Gubernur Ketut Pudja mengadakan perjalanan keliling Pulau Bali bersama dengan Ketua KNI Sunda Kecil Ida Bagus Putra Manuaba. Mereka datang ke setiap kerajaan untuk memberi penerangan kepada raja-raja dan rakyat Bali mengenai kemerdekaan Indonesia dan telah berdirinya Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil. Ia juga mengirim utusan ke Lombok dan Sumbawa Besar untuk tujuan yang sama. Di samping pembentukan KNI, di tingkat provinsi dan kabupaten dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat.

Selama menjabat Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Ketut Pudja beberapa kali masuk tahanan. Pertama kali ia diculik oleh Jepang akibat penyerbuan para pemuda yang gagal untuk mendapatkan senjata pada tanggal 13 Desember 1945. Ia ditahan lebih-kurang sebulan.

Jepang berusaha untuk membujuk raja-raja dengan membangkit-bangkitkan kekuasaan *selfbestuurder* yang dulu dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Untuk itu Jepang menculik kembali I Gusti Ketut Pudja pada bulan Februari 1946 untuk menggagalkan kekuasaan yang telah terlanjur diserahkannya. Karena situasi politik semakin tidak mengizinkan, Jepang membebaskan I Gusti Ketut Pudja kembali dan tentara Sekutu mulai masuk di Bali.

Sekutu berusaha mendekati Gubernur Ketut Pudja dan menjelaskan maksud dan tujuan mereka di Bali. Kedatangan pasukan NICA yang menggantikan tentara Sekutu tidak mendapat sambutan hangat dari Gubernur Ketut Pudja, karena itu pada tanggal 11 Maret 1946 Gubernur Ketut Pudja ditangkap atas perintah Panglima Tentara Sekutu Jawa Timur, dengan alasan ketertiban dan keamanan tidak terjamin di Sunda Kecil.

Gubernur Ketut Pudja serta tahanan politik lainnya diperlakukan kasar oleh NICA. Mereka diejek, dicaci dan direndahkan. Kadang-kadang mereka diancam, ditakut-takuti, dan dibujuk agar mereka berbalik haluan. Gubernur Ketut Pu-

dja tetap teguh pendirian, tabah menerima perlakuan NICA dan tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah dibebaskan dari tahanan, I Gusti Ketut Pudja masuk ke daerah Republik Indonesia yaitu ke Yogyakarta. Kedatangannya disambut hangat oleh Presiden Soekarno. Ia ditempatkan pada Kementerian Dalam Negeri dan diberi tugas mengikuti jalannya pemerintahan di daerah-daerah.

Dalam bulan Mei 1950, dengan persetujuan Pemerintah Pusat RI, I Gusti Ketut Pudja ditunjuk sebagai menteri kehakiman dalam Kabinet Putuhena sampai terbentuknya "Negara Kesatuan". Beberapa waktu kemudian ia diangkat sebagai anggota Panitia Likuidasi Indonesia Timur dan menetap di Makasar sampai akhir tahun 1950.

Pada awal tahun 1951, I Gusti Ketut Pudja diangkat sebagai gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dipekerjakan pada perdana menteri dengan tugas sebagai penghubung parlemen.

Dalam bulan Agustus 1954, I Gusti Ketut Pudja dipindahkan dan diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan. Tiga tahun kemudian yaitu dalam tahun 1957, ia diangkat sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Keuangan. Pada September 1960, Ketut Pudja diangkat menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jabatan tersebut dipangkunya hingga memasuki masa pensiun dalam tahun 1968, tetapi karena tenaga dan pemikirannya masih dibutuhkan, ia diangkat sebagai anggota Pengawas Keuangan Negara (PEKUNEG).

I Gusti Ketut Pudja seorang yang sangat teguh pendirian, setia mengabdi kepada negara dan bangsa. Ia hidup sederhana, tenaga dan pemikirannya benar-benar disumbangkan kepada negara dan bangsa tanpa pamrih. Pengabdiannya yang besar ini akan tetap tercatat dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa.

Untuk melengkapi data penulisan biografi tokoh ini, penulis telah mengadakan studi kepustakaan, penelitian lapangan dan mengadakan serangkaian wawancara dengan beberapa tokoh yang pernah kenal dengan I Gusti Ketut Pudja. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kelengkapan isi maupun penyajian biografi tokoh nasional I Gusti Ketut Pudja ini jauh dari sempurna, karena itu dengan penuh harap, penulis menunggu anjuran dan saran dari segala pihak.

BAB I ASAL–USUL DAN PENDIDIKAN

Bali, adalah salah satu daerah yang penduduknya gigih dalam mempertahankan hak-hak kemanusiaan dalam menegakkan kemerdekaan. Daerah-daerah lain sudah terpaksa menyimpan senjatanya sejak abad-abad sebelumnya, tetapi daerah Bali masih bergolak dengan semangat tinggi, mempertahankan jiwa dan raga. Berbagai tempat telah menjadi arena pertumpahan darah seperti peristiwa Perang Buleleng, Perang Jagaraga, Perang Banjar, Puputan Badung dan Puputan Klungkung. Barulah pada tanggal 2 Mei tahun 1908 Belanda berhasil menaklukkan seluruh daerah Bali setelah dapat menghancurkan Klungkung sebagai kerajaan terakhir.

Takluknya seluruh daerah Bali memberi keleluasaan kepada Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengatur daerah itu. Namun demikian Pemerintah Belanda belum dapat sepenuhnya menerapkan sistem birokrasi Barat secara keseluruhan, karena sarana maupun tenaga yang terdidik belum tersedia. Pada awal abad ke-20 itu sistem pemerintahan di Bali dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) *Rechtsreeks bestuurd gebied* Buleleng dan Jembrana (2) *Zelfbestuurende landschappen* Badung, Tabanan, Klungkung dan Bangli dan (3) *Stedehouder bestuurd* Gianyar dan Karangasem. Masing-masing daerah atau kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja didampingi oleh seorang kon-

troler. Tiap-tiap kerajaan dibagi lagi atas beberapa distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang punggawa. Di bawah punggawa adalah perbekel atau kepala desa, yang merupakan lembaga pemerintahan tingkat paling bawah yang dibantu oleh petugas yang disebut klian untuk berhubungan langsung dengan rakyat. Penguasa tertinggi di bidang pemerintahan terletak di tangan residen yang mempunyai kekuasaan di seluruh Bali dan Lombok. Residen berkedudukan di Singaraja. Khusus untuk Bali, Pemerintah Belanda menempatkan seorang asisten residen yang berkedudukan di Denpasar.

Dalam suasana seperti itulah kemudian lahir seorang tokoh yang akan disajikan dalam penulisan ini, yaitu I Gusti Ketut Pudja. Ia lahir pada tanggal 19 Mei 1908 di Sukasada, Singaraja, Bali. Ayahnya bernama I Gusti Nyoman Raka dan ibunya bernama Jero Ratna Kusuma. I Gusti Nyoman Raka adalah putra I Gusti Nyoman Kaler dan Jero Ratna Kusuma adalah putri I Nyoman Gempol. I Gusti Nyoman Kaler, kakek I Gusti Ketut Pudja ini adalah saudara sepupu I Gusti Nyoman Jelantik, *regent* pertama Kerajaan Buleleng.

I Gusti Nyoman Raka, ayah Ketut Pudja, pada waktu itu adalah punggawa di Sukasada, Singaraja. Seorang punggawa bertugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, dan kadang-kadang juga membantu urusan adat dan agama di daerah kekuasaannya. Seorang punggawa bertanggung jawab langsung kepada raja. Jabatan punggawa pada umumnya diduduki oleh keluarga bangsawan dari kasta ksatria.

I Gusti Nyoman Raka dengan Jero Ratna Kusuma mempunyai empat orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak pertama ialah I Gusti Gede Jelantik (Bupati Buleleng I), anak kedua I Gusti Made Tedja, anak ketiga I Gusti Nyoman Wirya, anak keempat perempuan yakni I Gusti Ayu Ningrat, dan anak kelima I Gusti Ketut Pudja.

Mula-mula Ketut Pudja tidak dikirim ke sekolah, karena saat itu sekolah belum lazim di Bali. Ayahnya mendatangkan

seorang guru untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Yang didatangkan ke rumah untuk mengajar itu belum tentu seorang guru (yang profesinya sebagai guru), melainkan seorang yang dianggap pandai. Demikianlah Ketut Pudja belajar membaca, menulis dan berhitung dari seorang "mantri" yakni *opium regie* (mantri candu) di Sukasada.

Sekolah pertama yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Bali adalah *Tweede Klasse School* di Singaraja pada tahun 1875. Untuk mendapatkan murid saat itu sangat sulit. Salah satu sebab adalah karena dilatar belakangi sistem sosial Bali yaitu adanya sistem kasta dan masih terikat oleh pola-pola pemikiran yang tradisional. Untuk mengatasi kekurangan murid ini, pemerintah kadang-kadang melakukan cara paksaan.

Pada tahun 1913 di Singaraja dibuka *Eerste Inlandsche School* dan kemudian *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Murid-murid yang diterima umumnya adalah anak-anak golongan penguasa (raja dan punggawa) atau anak-anak keluarga bangsawan. Demikianlah pada tahun 1915 sebagai anak punggawa Sukasada, Ketut Pudja dapat dengan mudah diterima di *Hollandsch Inlandsche School* Singaraja. Dalam tahun 1922, ia menamatkan HIS itu pada usia 14 tahun.

Setelah menyelesaikan *Hollandsch Inlandsche School*, Ketut Pudja ingin melanjutkan ke sekolah menengah pertama *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Tetapi pada waktu itu sekolah MULO belum ada di Bali. I Gusti Nyoman Raka, ayah Ketut Pudja telah menyadari akan pentingnya pendidikan, karena itu ia kemudian mengirim Ketut Pudja ke Jawa. Demikianlah Ketut Pudja melanjutkan sekolah MULO di Kota Malang. Ia seorang yang rajin dan tekun belajar, karena itu dalam tahun 1926 ia telah menyelesaikan sekolah MULO tersebut.

Selanjutnya Ketut Pudja memasuki *Algemene Middelbare School* (AMS) di Kota Bandung. Ia memilih jurusan A–II *Western Klasieke*. Mata pelajaran yang diberikan dalam *Western klassieke* adalah Bahasa Latin, Kebudayaan Kuno, Bahasa Be-

landa, Bahasa Inggeris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Sejarah, Ilmu Bumi, Ilmu Negara, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Tumbuhan dan Binatang, Menggambar dan Olah raga.

Setelah menamatkan pelajaran di *Algemene Middelbare School* dalam tahun 1929, ia melanjutkan pelajarannya pada *Rechts Hoge School* di Jakarta. Demikianlah dalam tahun 1934, ia berhasil lulus dari *Rechts Hoge School* dengan memperoleh gelar *Meester in de Rechten.* (sarjana hukum).

Sebagai putra daerah kelahiran Bali yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga terpandang di daerahnya, Ketut Pudja senantiasa diperkenalkan pada nilai-nilai luhur dalam adat-istiadat dan tradisi leluhurnya. Sikap patuh, hormat dan sopan memegang teguh adat-istiadat serta tradisi adalah perwatakan Ketut Pudja, sebagai hasil pembinaan keluarganya. Ditambah lagi pengalamannya selama menimba ilmu pengetahuan di luar daerahnya yaitu di Kota Malang, Bandung dan Jakarta, menambah kecintaan pada negeri asalnya. Ia berkeinginan memajukan masyarakat daerah Bali yang pada waktu itu dirasakannya sangat ketinggalan dibandingkan dengan keadaan di Jawa.

Demikianlah setelah menyelesaikan pelajarannya pada *Rechts Hoge School,* ia kembali pulang ke Bali. Keluarga mana yang tidak akan bangga, putra bungsunya pulang dan berhasil menyandang gelar *Meester in de Rechten,* Ketut Pudja merupakan orang Bali pertama yang bergelar *Meester in de Rechten.*

Dalam bulan Januari tahun 1935, Mr. I Gusti Ketut Pudja menyumbangkan tenaganya secara suka rela di Kantor Residen Bali dan Lombok. Residen adalah wakil Pemerintah Kolonial Belanda di Bali yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan dan berkedudukan di Kota Singaraja. Wilayah kekuasaannya tidak saja meliputi seluruh Bali tetapi juga meliputi seluruh Pulau Lombok.

Pada waktu bekerja di Kantor Residen, Mr. I Gusti Ketut Pudja masih membujang. Gajinya waktu itu sebanyak limapuluh gulden. Ayahnya kemudian memilihkan jodoh yang se-

padan. Pilihan jatuh pada sepupunya sendiri, dara ayu bernama I Gusti Ayu Made Mirah. Perkawinannya dilaksanakan secara meriah dengan adat tradisional Bali.

Dalam tahun 1936, Mr. I Gusti Ketut Pudja ditempatkan di bagian Pengadilan, yang pada masa itu di Bali disebut *Raad van Kerta*. Di daerah Bali pada waktu itu peradilan dibagi atas dua jenis. Peradilan Negara yang disebut *Landraad* yang mengurus pertikaian antara raja dan mengurus perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan bawahan yag disebut *Raad van Kerta*. Jadi pada dasarnya *Landraad* menyelesaikan peradilan permohonan banding, sedangkan *Raad van Kerta* adalah peradilan dalam tingkat pertama yang tugasnya di samping mengadili perkara-perkara kecil juga mengatur tata tertib kerajaan.

Tugas yang diberikan kepada Mr. I Gusti Ketut Pudja ialah mengerjakan persiapan revisi putusan *Raad van Kerta* seluruh Bali dan juga pengawasan urusan tanah bekas Kerajaan Badung, Tabanan dan Klungkung yang dijadikan "tanah bukti" *(ambtsvelden)*, untuk para perbekel (kepala desa). Jabatan perbekel secara administrasi berada di bawah punggawa. Seorang perbekel selama memangku jabatannya mendapat sebidang tanah yang disebut tanah bukti.

Pada tanggal 1 Juli 1938 terjadi perubahan penting dalam struktur pemerintahan di Bali yaitu pembentukan pemerintahan swapraja *(Zelf bestuur)*. Sistem birokrasi kolonial masih dibagi menjadi dua bagian yaitu pemerintahan orang Belanda dan pemerintahan pribumi. Struktur pemerintahan pribumi masih mengikuti sistem pemerintahan tradisional. Pucuk pemerintahan dipegang oleh *Zelf bestuurder* (raja) dengan titel Anak Agung. Daerah kekuasaannya disebut *negara (landschap)*. Negara dibagi menjadi beberapa distrik yang dikepalai oleh seorang punggawa, sedangkan distrik membawahi beberapa *perbekelan* yang dikepalai oleh seorang *perbekel* atau bendesa.[15]

Mengenai struktur pemerintahan yang ada di bawah asisten residen masih tetap sama yaitu terdiri atas kontroler mendampingi raja-raja yang memegang pemerintahan di negara (kerajaan) masing-masing.

Pada saat itu di Bali terdapat delapan *Zelfbestuur* (negara = kerajaan). Untuk mewujudkan kerjasama di antara kedelapan kerajaan di Bali dibentuklah *Paruman Agung* yang berkedudukan di Denpasar. Ketua Paruman Agung adalah residen Bali dan Lombok.

Sementara itu hubungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Nederland terputus sebagai akibat terjadinya peperangan di Eropa. Hindia Belanda mulai terancam karena Jepang telah mengumumkan Perang Pasifik. Untuk mempertahankan Hindia Belanda, dibentuklah pertahanan bersama tentara Sekutu. Pemerintah Hindia Belanda bertugas mempertahankan Puau Jawa, Madura dan Bali, sedangkan daerah-daerah lain diserahkan kepada Amerika dan Ingeris.

Untuk mempertahankan Pulau Bali, Pemerintah Belanda membentuk suatu kesatuan yang disebut Kesatuan Prayoda, semacam milisi yang diambil dari putra-putra Bali. Kesatuan Prayoda mempunyai persamaan dengan Legiun Mangkunegaran di Surakarta dan Legiun Pakualaman di Yogyakarta.

Pada tanggal 16 Februari 1942 terjadilah pertempuran laut di sebelah selatan Kota Denpasar. Pertempuran semacam itu terjadi juga di perairan Selat Bali. Sebelum Jepang mendarat di Bali, terjadilah pertempuran udara yang sangat hebat antara pasukan Jepang melawan Sekutu sehingga dua buah pesawat pemburu milik Australia jatuh masing-masing di Tuban dan di Desa Blahkiuh, Kabupaten Badung.

Pertempuran-pertempuran antara pasukan Jepang melawan tentara Sekutu berhenti dan kemudian barulah Jepang mendaratkan pasukannya di Bali. Pasukan Jepang berlayar dari Pilipina menuju ke selatan kemudian menduduki daerah-daerah penting di seluruh Sulawesi. Dari Sulawesi pasukan Jepang terus berla-

yar ke selatan masuk ke Selat Lombok akhirnya sampai di sebuah selat antara Pulau Nusa Penida dengan Pulau Bali yaitu di Selat Badung, pada tanggal 19 Februari 1942.

Pendaratan tentara Jepang di Bali boleh dikatakan tidak mendapatkan perlawanan dari alat-alat kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka hanya dapat melakukan taktik mundur dan siasat bumi hangus. Pulau Bali tidak mungkin dipertahankan lagi, karena itu alat-alat kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Bali, khususnya regu perusaknya membakar berpuluh-puluh gudang persediaan bersama isinya. Beratus-ratus drum bensin yang ada di gudang-gudang BPM dan DPM, baik di Kota Singaraja maupun yang ada di Kota Denpasar terbakar habis. Di Kota Denpasar, regu perusak mengarahkan sasarannya ke persediaan bensin di Suci, Benoa dan Tuban.

Sementara itu alat-alat kekuasan Pemerintah Kolonial Belanda yang tergabung di dalam kesatuan-kesatuan Prayoda mengikuti perintah opsir-opsir Belanda untuk segera mengundurkan diri dari tempat-tempat pertahanan seperti Tuban, menuju daerah pedalaman. Di Desa Penebel, Tabanan para opsir Belanda memerintahkan kepada kesatuan-kesatuan Prayoda untuk membuka pakaian masing-masing. Semua senjata dimusnahkan kemudian bubar menuju tempat asal mereka masing-masing.

Dari Kota Denpasar, serangan-serangan tentara Jepang dilancarkan ke seluruh daerah Bali. Kota Tabanan dan Negara jatuh, demikian juga Kota Gianyar. Jepang menyerang Kota Klungkung dari Pantai Batuklotok sedangkan dari Kota Singaraja, Jepang melancarkan serangannya terhadap Kota Karangasem. Jepang menduduki seluruh Pulau Bali tanpa perlawanan yang berarti dari pihak alat-alat kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Bali.

Pasukan angkatan darat Jepang *(Rikugun)* berhasil menaklukkan Pulau Bali, kemudian mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap orang-orang kulit putih terutama terhadap orang-orang Belanda yang memegang posisi penting di dalam

bidang pemerintahan kolonial. Residen, asisten residen dan kontroler ditangkap dan kemudian diangkut ke luar Bali, dimasukkan ke dalam tahanan di Pulau Jawa.

Pada waktu pasukan angkatan darat Jepang menduduki Pulau Bali, Mr. I Gusti Ketut Pudja menjabat sebagai anggota *Raad van Kerta* Badung di Denpasar. Ia diminta untuk membantu pemerintahan Jepang yang akan disusun. Ia kemudian mendapat tugas untuk mengaktifkan kembali kegiatan pemerintahan sipil. Ketut Pudja diangkat oleh Kapten Kanamura dari angkatan darat Jepang untuk menjalankan pemerintahan keresidenan di Singaraja sebagai *Redjikan dairi.*

Rikugun memegang kekuasaan di Bali selama lebih kurang tiga bulan. Pada bulan Mei 1942 pasukan ini meninggalkan Pulau Bali untuk kemudian diganti oleh pasukan angkatan laut *(Kaigun).* Mereka mulai menyusun pemerintahan sipil dan Kota Singaraja ditetapkan menjadi pusat pemerintahan untuk seluruh Sunda Kecil di bawah pimpinan seorang *"cookan".*

Sebenarnya Jepang masih tetap mempertahankan struktur pemerintahan yang telah dipergunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Jepang hanya mengadakan perubahan di dalam nama-nama jabatan dengan mempergunakan nama-nama yang diambil dari bahasa Jepang. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan kesan penjajahan Belanda di kalangan rakyat Bali.

Cookan adalah jabatan tertinggi di dalam pemerintahan Jepang di Bali. Pada waktu itu yang menjadi *Cookan* adalah seorang Jepang bernama *Menseibu* berkedudukan di Kota Singaraja dan jabatan ini dapat disejajarkan dengan residen pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Wilayah kekuasaan *cookan* sama dengan wilayah kekuasaan residen yaitu meliputi Pulau Bali dan Lombok. *Cookan* mempunyai kekuasaan dalam bidang pemerintahan sipil, sedangkan kekuasaan tertinggi militer dipegang oleh *Sirei* yang berkedudukan di Kota Denpasar.

Pemerintahan Jepang yang bersifat fasis memberi kekuasaan yang lebih besar kepada golongan militer. Karena itu *Sirei*

yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam bidang militer berhak mengawasi pemerintahan sipil.[26]

Khusus untuk pemerintahan militer, Jepang membagi Pulau Bali menjadi dua wilayah kekuasaan militer. *Hokubu Baliken* adalah wilayah Bali Utara, rupanya dapat disejajarkan dengan *Afdeeling Bali Utara* pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan *Nanbu Baliken* adalah wilayah Bali Selatan, dapat disejajarkan pula dengan *Afdeeling Bali Selatan.*

Untuk mengawasi pemerintahan raja-raja, Jepang menempatkan seoang *Bun ken Kan Rin Kan* di tiap-tiap kerajaan *(Syu). Bun Ken Kan Rin Kan* dapat disejajarkan dengan kontroler pada zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Raja-raja beserta aparat yang ada di bawahnya seperti punggawa, perbekel dan klian diizinkan untuk tetap memegang Pemerintahan. Istilah *selfbestuurder* tidak lagi digunakan. Pada zaman pendudukan Jepang, raja disebut dengan *syu co.* Para punggawa tetap membantu raja dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Nama punggawa diganti dengan sebutan *gun co,* sedangkan perbekel disebut *son co.* Setelah Bali berada dalam kekuasaan Angkatan Laut Jepang, dalam bulan Juli 1942, Mr. I Gusti Ketut Pudja diangkat sebagai *gijosei komon* (penasihat umum).

Mengingat keadaan perang semakin hari semakin memburuk bagi Angkatan Perang Jepang, maka Jepang terpaksa mengambil sikap politik yang lain terhadap daerah-daerah yang didudukinya. Para pejabat tinggi Jepang sibuk membuat rencana baru yang mungkin dapat menarik simpati dan kemauan kerjasama rakyat di daerah-daerah pendudukan. Perdana Menteri Tojo pada awal tahun 1943 menginstruksikan kepada komandan-komandan angkatan perang di daerah Selatan untuk turut mengadakan penyelidikan ke arah itu. Bagi Indonesia instruksi itu berisi perintah menyelidiki kemungkinan-kemungkinan memberi kemerdekaan.

Pada awal Agustus 1943 Letnan Jnderal Kumakici Harada mengumumkan garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan yang dijanjikan itu. Rencana itu meliputi pembentukan badan-badan pertimbangan di daerah-daerah dan di pusat dan pengangkatan orang-orang Indonesia untuk kedudukan yang tinggi.

Realisasi dari rencana itu ialah dibentuknya badan pertimbangan baik di pusat maupun di daerah-daerah. Badan itu dinamai *Cuo Sangi In* (Badan Pertimbangan Pusat) di Jakarta dan *Sangi Kai* (Badan pertimbangan Daerah) di tiap-tiap keresidenan.

Di daerah Bali dibentuk pula Badan Pertimbangan Daerah yang disebut *Syu Kaigi* dan berkedudukan di Singaraja. *Syu Kaigi* berfungsi sebagai badan yang meminta usul dan jawaban mengenai pemerintahan daerah agar dapat dijalankan dengan tepat. I Gusti Ketut Pudja ditunjuk untuk duduk dalam *Syu Kaigi* itu sebagai wakil bidang pemerintahan.

Pada awal Februari 1944 di Bali dibentuk pula suatu pasukan sukarela yang bernama Pembela Tanah Air (PETA). Setelah para sukarelawan mendapat pendidikan selama tiga bulan di Singaraja, maka anggota PETA tersebut disebar ke dalam tiga buah *daidan* (batalyon) masing-masing di Negara, Kediri (Tabanan) dan Gunaksa (Klungkung). Selain PETA, sebagian pemuda dididik pula untuk menjadi pelaut *(kaigun heiho)*, polisi *(jumpo)*, barisan pemuda *(seinandan)* dan hansip *(keibodan)*.

Di samping itu rakyat dikerahkan untuk membuat tempat-tempat pertahanan di daerah Pegunungan Candi Kuning, Pantai Buleleng, Pantai Kusamba, pantai Kuta, dan Pantai Soka. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Pemerintah Jepang mewajibkan para petani menyerahkan sebagian padinya kepada pemerintah, dan rakyat dianjurkan untuk makan ketela, jagung dan umbi-umbian.

Tentara Jepang juga merampok bahan makanan rakyat. Ketika ada latihan bahaya udara, rakyat diharuskan berlindung, tetapi sementara itu tentara Jepang mengambil bahan pangan rakyat yang sudah ditumpuk untuk dijual. Jepang bertindak keras dan kejam tanpa peri kemanusiaan terhadap rakyat yang tidak mau tunduk kepada peraturan-peraturan mereka. Kekejaman Jepang tersbut menimbulkan rakyat tidak menyukai mereka tetapi rakyat tidak berani menentang mereka secara terang-terangan. Namun demikian secara tidak sengaja Jepang telah menanamkan kepada kita semangat patriotisme dan harga diri sebagai bangsa.

Dalam pertengahan bulan Agustus 1945, I Gusti Ketut Pudja ditunjuk untuk mewakili Sunda Kecil dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Alasan penunjukan itu karena ia dianggap yang paling banyak mengetahui masalah pemerintahan di Sunda Kecil, yaitu sebagai *giyosei komon* (penasehat umum) kepala pemerintahan Sunda Kecil selama ini. Ia berangkat ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 penguasa Jepang memerintahkan di Bali kepada anggota PETA di Daidan Negara, Daidan Kediri (Tabanan) dan Daidan Gunaksa (Klungkung) untuk melucuti senjata mereka dan akan diberi cuti untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Keesokan harinya barulah diketahui bahwa Jepang telah kalah. Dalam situasi yang tidak jelas itulah para anggota bekas PETA pulang ke daerah masing-masing. Sementara itu berita tentang adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta mulai terdengar secara samar-samar. Hal itu diketahui karena adanya kontak dengan para pemuda di Jawa dan adanya berita dari para pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang, *Domei*.

Pada tanggal 21 Agustus 1945 baru ada pengumuman resmi dari pihak *Cookan*. Pengumuman yang dikeluarkan, pertama ialah bahwa Jepang telah kalah dan menyerah kepada Se-

kutu dan kedua, bahwa di Jakarta telah terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Di Jakarta Ketut Pudja aktif dalam rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai selesai. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Ketut Pudja diangkat oleh presiden Republik Indonesia untuk menjabat gubernur Sunda Kecil. Wilayah Provinsi Sunda Kecil pada masa itu meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Kepulauan Flores sampai dengan Kepulauan Timor. Sehari setelah pengangkatan, ia pulang ke Bali untuk memulai tugas baru.

Mulai tanggal 8 Juli 1947 Ketut Pudja dipekerjakan sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri. Ia diberi tugas untuk mengikuti jalannya pemerintahan di daerah-daerah.

Selanjutnya tanggal 10 Mei 1950 dengan persetujuan Pemerintahan RI di Yogyakarta, I Gusti Ketut Pudja ditunjuk sebagai menteri kehakiman Negara Indonesia Timur dan berkedudukan di Makasar. Kedudukan itu dipangkunya mulai 1 Agustus 1950 sampai dengan 30 Nopember 1950. Kemudian ia diangkat sebagai anggota panitia Penyelenggara Perubahan Tata Negara dan Likuidasi Negara Indonesia Timur dari tanggal 1 Agustus 1950 sampai dengan 30 Nopember 1950.

Pada tanggal 1 Desember 1950, ia diperkerjakan kembali sebagai gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian ia dipindahkan ke Jakarta sebagai gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, pada pertengahan April 1951.

Mulai 1 Juli 1954, I Gusti Ketut Pudja diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan. Pada tahun 1957 sewaktu Drs. A.K. Pringgodigdo SH menjabat ketua Dewan Pengawas Keuangan, ia ditetapkan menjadi wakil ketua Dewan Pengawas Keuangan tersebut, tetapi karena ketua Dewan Pengawas Keuangan menderita sakit sejak bulan September 1960, Ketut Pudja kemudian menjabat sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tetap ia pegang sampai ia memasuki masa pensiun dalam tahun 1968. Ia pensiun dalam usia enampuluh tahun, tetapi karena tenaganya masih dibutuhkan, ia diangkat kembali sebagai anggota Pengawas Keuangan Negara (PEKUNEG), sampai PEKUNEG dibubarkan pada bulan Maret 1973.

BAB II MEWAKILI SUNDAKECIL DALAM PPKI

Pada tanggal 29 April 1945 Pemerintahan Pendudukan Jepang di Jawa telah mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan *(Dokuritzu Jumbi Cosakai).* Maksud dan tujuan mendirikan Badan tersebut ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pelbagai hal yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia merdeka. Susunan pengurusnya terdiri atas sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri atas seorang ketua *(kaico),* dua orang ketua muda *(fuku kaico)* dan enampuluh orang anggota *(iin),* termasuk empat orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda. Di samping itu terdapat pula tujuh orang anggota Jepang, yang duduk dalam pengurus istimewa. Mereka ini berhak menghadiri setiap sidang tetapi tidak mempunyai hak suara.

Pada tanggal 28 Mei 1945, dilangsungkanlah upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan bertempat di gedung *Cuo Sangi In,* jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri). Turut menghadiri upacara tersebut ialah Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Letnan Jenderal Nagano (panglima Tentara Keenambelas di Jawa). Pada kesempatan itu

dilakukan upacara pengibaran bendera Jepang, *hinomaru* yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan mulai mengadakan persidangan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, dimulai dengan persoalan "dasar" bagi Negara Indonesia Merdeka. Persidangan pertama berlangsung mulai tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam persidangan pertama itu para pembicara memusatkan pikiran pada usaha merumuskan dasar bagi Negara Indonesia Merdeka. Di antara para pembicara yang mengajukan gagasan yang konsepsional adalah Mr. Muh. Yamin, Prof.Dr.Mr. Supomo dan Ir. Soekarno.

Pada rapat pertama tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin di dalam pidatonya mengemukakan lima "Azas dasar Negara Kebangsaan Indonesia", yakni:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Dua hari kemudian, yakni pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr.Mr. Supomo di dalam pidatonya mengusulkan konsepsi negara dengan judul "Dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka". Keesokan harinya, yakni pada tanggal 1 Juni 1945, berlangsung rapat terakhir persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama "Lahirnya Pancasila". Di dalam pidato itu Ir. Soekarno mengusulkan perumusan dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno adalah:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tersebut tidak menghasilkan sesuatu kesimpulan atau perumusan. Selama persidangan berlangsung, para anggota hanya mendengarkan pemandangan umum dari pembicara-pembicara yang mengajukan usul-usul rumusan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Setelah persidangan pertama itu selesai, diadakanlah reses selama jangka waktu satu bulan lebih.

Selama reses itu, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan berkumpul untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum para anggota. Kesembilan orang anggota tersebut biasa disebut "Panitia Sembilan" yang terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, M.A.A Maramis, Abdulkahar Muzakhir, Wachid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso. Panitia Sembilan telah menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia Merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Oleh Mr. Muh. Yamin rumusan hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberi nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta. Rumusan ke-3 dari dasar Negara Indonesia Merdeka berbunyi:

1. ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. persatuan Indonesia
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Perumusan terakhir *draft* dasar negara dilakukan pada persidangan kedua yang mulai pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam sidang itu dibahas rencana undang-undang dasar melalui suatu Panitia Perancang Undang-undang Dasar yan diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil Undang-undang Dasar yang beranggo-

takan 7 orang, yaitu Prof.Dr.Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Sukirman. Hasil panitia kecil tersebut disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain yang terdiri atas Prof.Dr. P.A. Husein Djajadiningrat. Di dalam merumuskan undang-undang dasar, panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta sebagai konsep pembukaannya yang mengandung pula rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Setelah menyelesaikan tugasnya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk suatu badan baru yang dinamakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia *(Dokuritzu Jumbi Iinkai)*. Peresmian pembentukan badan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945 sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauci, penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Untuk pengangkatan itu Jenderal Besar Terauci memanggil tiga tokoh Pergerakan Nasional terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Mereka berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945 menuju ke markas besar Terauci di Dalat (Vietnam Selatan). Dalam pertemuan di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945 itu Jenderal Besar Terauci menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Duapuluh satu anggota telah dipilih, tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Pulau Jawa, tetapi juga dari pulau-pulau yang lain, yaitu 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatra, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), seorang dari Maluku dan seorang dari golongan penduduk Cina.

Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dr. Radjiman Wediodiningrat, Otto Iskandardi Nata, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Surjohamidjojo, M. Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, Prof.Dr.Mr. Supomo, Abdul Kadir, Purbojo, dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul Abbas, Dr. G.S.S.J. Ratu Langi, Andi Pangeran, A.A. Hamidhan, Mr. I Gusti Ketut Pudja, Mr. J. Latuharharry dan Drs. Yap Tjwan Bing. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Telah direncanakan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Semua anggota telah diundang untuk menghadiri sidang tersebut.

Setelah ketiga tokoh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat pulang kembali ke Jakarta, barulah mereka mengetahui bahwa Jepang telah mengalami pemboman oleh Sekutu atas Kota Hiroshima dan Nagaski dengan bom atom, sedangkan Uni Sovyet telah melakukan penyerbuan ke Manchuria.

Dengan demikian dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga Proklamasi Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Insinyur Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan tersebut di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan demikian tidak me nyalahi ketentuan yang telah digariskan Pemerintah Jepang, yang menetapkan bersidangnya para anggota yang pertama pada tanggal 16 Agustus 1945.

Sikap dan pendirian inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yan menganggap Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan buatan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana yang telah digariskan oleh Jenderal Besar Terauci dalam

pertemuan di Dalat. Sebaliknya mereka menghendaki dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari Jepang.

Sutan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tanpa menunggu janji Pemerintah Jepang yang dikatakannya sebagai tipu muslihat belaka, karena ia telah mendengarkan siaran radio yang tidak disegel Pemerintah Jepang, sehingga ia mengetahui bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dikemukakannya pada tanggal 15 Agustus 1945, dalam suatu pertemuan dengan Drs. Moh. Hatta pada waktu Hatta kembali dari Dalat. Namun demikian Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta masih ingin mengecek kebenaran berita tentang kapitulasi Jepang pada pihak resmi dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Langkah berikutnya yang dilakukan golongan pemuda ialah mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta (sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 20.00 WIB). Di antaranya hadir Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana dan Armansyah. Keputusan rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada bangsa lain atau kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan dapat diadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta agar supaya mereka diikutsertakan menyatakan proklamasi.

Keputusan rapat tersebut disampaikan pukul 22.30 waktu Jawa atau zaman Jepang (pukul 22.00 WIB) kepada Ir. Soekarno di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56

(sekarang Proklamasi 56) Jakarta. Ir. Soekarno tetap pada pendiriannya perlunya diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu.

Adanya perbedaan pendapat itu telah mendorong golongan pemuda untuk membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan oleh golongan pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 24.00 WIB) menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di asrama Baperki, Cikini 71 Jakarta. Selain dihadiri oleh para pemuda yang sebelumnya berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur, rapat itu juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi dan Barisan Pelopor dan Shodanco dari *daidan PETA Jakarta Syu.* Bersama Chairul Saleh mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu yaitu antara lain "menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang". Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang, *Shodanco* Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Demikianlah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 04.00 WIB), Ir. Soekarno dan Drs, Moh. Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke luar kota menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kewedanaan di sebelah timur Jakarta.

Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Soekarno - Hatta karena perhitungan militer. Antara anggota PETA *Daidan Purwakarta* dan *Daidan Jakarta* terdapat hubungan erat semenjak mereka mengadakan latihan bersama-sama. Di samping itu Rengasdengklok letaknya terpencil 15 km ke dalam dari Kedunggede, Karawang pada jalan raya Jakarta – Cirebon. Dengan demikian deteksi dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari Jakarta, maupun dari Bandung atau Jawa Tengah.

Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka berdua agar segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan terlepas dari setiap kaitan dengan Jepang, rupanya tidak terlaksana. Agaknya kedua pemimpin senior itu mempunyai wibawa yang cukup besar, sehingga para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok segan untuk melakukan penekanan. Namun demikian, dalam suatu pembicaraan berdua dengan Soekarno, *Shodanco* Singgih menganggap Soekarno menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Proklamasi itu segera setelah kembali ke Jakarta. Berdasarkan anggapan itu *Shodanco* Singgih pada tengah hari itu kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana Proklamasi itu kepada teman-temannya pimpinan pemuda.

Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda tercapai pula kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta, di mana Laksamana Tadasyi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda pada hari itu juga mengantarkan Mr. Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok untuk menyemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Rombongan sampai pada pukul 18.00 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 17.30 WIB). Di Rengasdengklok, Ahmad Subardjo memberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00 Dengan jaminan tersebut komandan kompi PETA setempat Cudanco Subeno bersedia melepas Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.

Rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sampai di Jakarta pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 23.00 WIB), langsung menuju ke rumah Laksamana Tadasyi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta singgah di rumah mereka masing-masing terlebih dahulu.

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama telah direncanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Semua anggota daerah telah datang berkumpul di Jakarta dan menginap di Hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan Duta Merlin). Demikian pula Mr. I Gusti Ketut Pudja, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mewakili Sunda Kecil sudah pula sampai di Jakarta.

Pada tanggal 16 Agustus 1945, pagi pukul 09.30 waktu Jawa zaman Jepang, semua anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diantaranya Mr. I Gusti Ketut Pudja telah datang untuk menghadiri rapat di Pejambon. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut tidak dapat terlaksana oleh karena Ketua dan Wakil Ketua Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak hadir, karena mereka dibawa oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok.

Sekalipun terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, akan tetapi sekembalinya dari Rengasdengklok akhirnya rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan pukul 24.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 24.00 WIB) di rumah Laksamana Tadasyi Maeda, Jalan Imam Bonjol Jakarta. Di rumah Laksamana itulah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun.

Yang hadir dalam rapat di rumah Laksamana Maeda itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Subardjo, Mr. Sutardjo, Mr. Teuku M. Hasan, Mr. Latuharharry, dr. Radjiman Wediodiningrat, dr. M. Amir, Jusuf Kunto, Dr. G.S.S.J. Ratu Langi, Mr. I. Gusti Ketut Pudja, Otto Iskandardi Nata, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Abbas, Andi Pangeran, Prof.Dr.Mr. Supomo, Chairul Saleh, Sukarni, dr. Samsi, Dr. Buntaran, Andi Sultan Daeng Radja, Hamidhan, A.R. Ripai dan lain-lain.

Dalam rapat itu telah berhasil disusun rumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di ruangan terpisah yang terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Subardjo dari golongan tua, Sukarni, mbah Diro, B.M. Diah dari golongan muda menyaksikan pembahasan perumusan naskah Proklamasi Ke-

merdekaan Indonesia. Hatta mendiktekan naskah proklamasi atas permintaan Soekarno, sedangkan Soekarno menuliskannya di atas kertas yang berbunyi sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 - 8 - 05.
Wakil-2 bangsa Indonesia.

Setelah kelompok yang menyendiri di ruang yang terpisah itu selesai dengan merumuskan naskah proklamasi, kemudian mereka menuju ke serambi muka untuk menemui para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan para pemuda berkumpul. Waktu itu menunjukkan pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 04.00 WIB). Ir. Soekarno mulai membuka pertemuan menjelang subuh itu dengan membacakan rumusan naskah Proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada anggota yang hadir Ir.Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran tersebut diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengambil contoh kepada naskah *Declaration of Independence*.

Salah seorang tokoh pemuda yaitu Sukarni, mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan itu cukup dua orang saja yaitu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni itu disetujui oleh semua yang hadir, dan kemudian Sayuti Melik ditugaskan untuk mengetik naskah itu kembali disertai perubahan yang telah disetujui.

Sayuti Melik segera mengetik naskah dari rumusan Proklamasi Kemerdekaan. Ada tiga perubahan yang terdapat pada

naskah bersih itu, yakni kata-kata "tempoh" diganti dengan "tempo" sedangkan "wakil-wakil bangsa Indonesia" pada bagian akhir diganti dengan "Atas nama Bangsa Indonesia". Demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal yaitu "Djakarta, 17-8-05 menjadi "Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05".

Naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di rumah Laksamana Maeda itu juga. Demikianlah pertemuan yang telah menghasilkan naskah Proklamasi Kemerdekaan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 dinihari.

Selanjutnya dipikirkan suatu cara untuk menyebarluaskan naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang bagian tenggara Lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan sebagai tempat untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta guna mendengarkan pembacaan naskah Proklamasi. Insinyur Soekarno menganggap bahwa Lapangan Ikada adalah salah satu lapangan umum yang dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Oleh karena itu Ir. Soekarno mengusulkan supaya upacara pembacaan Proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Usul itu disetujui dan ditetapkan bahwa pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 10.00 WIB).

Pada pukul 05.00 barulah para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, para pemimpin Indonesia dan para pemimpin pemuda meninggalkan rumah Laksamana Maeda dengan diliputi perasaan bahagia dan bangga. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Mr. I Gusti Ketut Pudja bersama-sama anggota daerah lainnya kembali ke Hotel Des Indes.

Mereka yang hadir dalam pertemuan di rumah Laksamana Maeda telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di

Jalan Pegangsaan Timur 56, pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang. Sebelum semuanya pulang Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita terutama B.M. Diah untuk memperbanyak teks proklamasi itu dan menyiarkan ke seluruh dunia.

Sementara itu para pemuda tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, mereka melakukan kegiatan-kegiatan membagi tugas dalam kelompok-kelompok dalam rangka persiapan penyelenggaraan pembacaan Proklamasi. Kegiatan mereka dibagi-bagi. Masing-masing kelompok mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan berita kepada masyarakat bahwa saat Proklamasi Kemerdekaan telah tiba.

Di antara mereka adalah para pemuda yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (sekarang Jalan Minangkabau) dari kelompok Sukarni. Malam itu mereka rapat di Kepu (Kemayoran), kemudian pindah ke *Defensielijn van den Bosch* (sekarang Bungur Besar) untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita Proklamasi. Semua alat komunikasi akan dipergunakan untuk tujuan tersebut. Pamflet, pengeras suara, mobil-mobil akan dikerahkan ke segenap penjuru kota. Diusahakan pula pengerahan massa untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56.

Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, tanpa diduga oleh siapa pun, barisan pemuda datang berbondong-bondong menuju ke Lapangan Ikada. Rupanya pihak Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, karenanya Jepang berusaha untuk menghalanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi dari kawan-kawannya yang disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut bahwa Proklamasi akan dibacakan di Lapangan Ikada.

Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro menuju ke Lapangan Ikada. Ia melihat pasukan-pasukan Jepang yang bersenjata lengkap menjaga lapangan tersebut. Keadaan itu dilaporkan

kepada dr. Muwardi mengenai keamanan Ir. Soekarno pada waktu itu. Ia mendapat penjelasan bahwa Proklamasi tidak diadakan di Ikada, melainkan di Pegangsaan Timur 56. Segera ia kembali ke Ikada untuk memberitahukan bahwa Proklamasi diadakan di Pegangsaan Timur 56.

Pagi hari itu juga rumah Ir. Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda. Mereka berbaris dengan tertib dan teratur. Untuk menjaga keamanan jalannya pembacaan Proklamasi, dr. Muwardi telah meminta kepada *Cudanco* (komandan kompi) Latief Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. Soekarno. Permintaan itu dipenuhi oleh *Cudanco* Latief, dan beberapa orang prajurit PETA berjaga-jaga di sekitar jalan kereta-api yang membujur di belakang rumah itu. Di samping itu di asrama mereka di Jaga Monyet telah disiagakan pasukan yang dipimpin oleh *Syodanco* Arifin Abdurrahman.

Sebagaimana yang telah disepakati semula, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, para pemimpin Indonesia dan para pemuda menjelang pukul 10.30, telah berdatangan ke Pegangsaan Timur 56 untuk menyaksikan upacara pembacaan Proklamasi. Hadir dalam pembacaan Proklamasi itu sekitar seratus orang, di antaranya terdapat Mr. I Gusti Ketut Pudja wakil Sunda Kecil. Acara yang telah ditetapkan dalam upacara proklamasi itu ialah:

Pertama, pembacaan Proklamasi
Kedua, pengibaran bendera Merah Putih
Ketiga, sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi.

Beberapa menit sebelum pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang, *Cudanco* Latief Hendraningrat menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke dalam rumah, lalu keluar bersama menuju tempat upacara, diiringi oleh Nyonya Fatmawati Soekarno. Upacara tersebut berlangsung tanpa pembawa acara. Segera Latief memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief memper-

silakan Ir. Soekarno. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas ia mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat sebelum membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan sebagai berikut.

"Saudara-saudara sekalian! Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita itu ada naik ada turunnya, tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekalia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara sekalian!

Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kita.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno & Hatta
(tandatangan Soekarno)
tanda tangan Hatta).

Acara berikutnya ialah pengibaran bendera Merah Putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih-kurang dua meter dari depan tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari tempat yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali, dibantu *Cudanco*. Latief. Bendera Merah Putih dinaikkan perlahan-lahan Tanpa ada komando para hadirin yang menyaksikan upacara tersebut menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat.

Setelah penaikan bendera selesai, kemudian diteruskan dengan sambutan dari Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi. Peristiwa yang bersejarah ini berlangsung hanya lebih-kurang satu jam, penuh khidmat walaupun sangat sederhana, namun telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Berita Proklamasi yang telah meluas di seluruh Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus itu juga, teks Proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei *Waidan* B. Palenewen. Ia menerima teks itu dari wartawan Domei. Segera ia memerintahkan F. Wuz seorang markonis, supaya menyiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz menyiarkannya, masuklah seorang Jepang ke ruangan radio. Ia mengetahui berita Proklamasi itu telah tersiar keluar lewat udara. Sambil marah-marah orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan, akan tetapi *Waidan* Palenewen memerintahkan kepada F. Wuz untuk terus menyiarkannya. Berita kemudian diulang setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti.

Sebagai akibat dari penyiaran itu, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Usaha para pemuda dalam menyiarkan berita itu tidak terbatas lewat radio, melainkan juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikianlah berita proklamasi tersebut tersiar ke seluruh pelosok tanah air.

Kesibukan selanjutnya sesudah Proklamasi adalah menyusun tatanan mengenai kehidupan kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu rapat yang pertama sesudah Proklamasi. Sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Mohammad Hasan, untuk membicarakan masalah rancangan pembukaan undang-undang dasar, yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945, khususnya pada kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut. Beberapa orang anggota itu dengan dipimpin oleh Hatta masuk salah satu ruangan untuk bertukar pikiran mengenai cara pemecahan masalah tersebut. Akhirnya dalam waktu lima belas menit dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang akan menjadi rintangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah pertukaran pikiran itu, rapat pleno dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota. Rapat pertama ini membahas rancangan pembukaan dan Undang-undang Dasar yang telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan berhasil dibahas dalam waktu lebih-kurang dua jam. Kemudian sidang "dichors" pada pukul 13.30 dan akan dimulai lagi pukul 15.15.

Selanjutnya pada awal pembukaan sidang kedua ini, Ir. Soekarno mengumumkan enam anggota baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah Wiranatakusumah,

Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Subardjo.

Sebelum memulai acara berikutnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno meminta agar disahkan fasal III dalam aturan peralihan. Setelah itu Oto Iskandardi Nata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi saja. Ia memajukan calon Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Semua anggota sidang menerima usul tersebut dengan aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah acara pemilihan presiden dan wakil presiden, sidang melanjutkan acara membahas pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan. Dengan perubahan-perubahan kecil seluruh rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan disepakati oleh sidang.

Hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, telah mengambil keputusan yang berikut:

1. menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
2. menetapkan dan mengesahkan Undang-unang Dasar 1945.
3. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
4. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional

Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memperoleh landasan kehidupan bernegara, yang meliputi dasar negara yaitu Undang-undang Dasar. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itu mengandung dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila.

Sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini diakhiri, Presiden Soekarno menunjuk sembilan orang anggota sebagai panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun ran-

cangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak. Yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Mereka yang ditunjuk adalah Oto Iskandardi(Nata, Subardjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi dan Mr. I Gusti Ketut Pudja.

Sidang dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Acara pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandardi Nata. Sebelum sidang dimulai, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subardjo, dan Sutardjo Kartahadikusumo untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan bentuk kementerian.

Hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar di Nata, dibahas dan kemudian menghasilkan keputusan berikut :

a. pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi beserta calon gubernurnya yaitu:
   Jawa Barat
   Jawa Tengah
   Jawa Timur
   Borneo, calon Ir. Moh. Noor
   Sulawesi, calon Dr. G.S.S.J. Ratu Langi
   Sunda Kecil, calon Mr. I Gusti Ketut Pudja
   Sumatera, calon Mr. T. Mohammad Hasan
   dan 2 daerah istimewa Jogyakarta dan Surakarta.

b. adanya Komite Nasional (daerah)

Berikutnya dibahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo. Panitia ini mengusulkan adanya tiga belas kementerian. Setelah dibahas oleh sidang maka diputuskan adanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembahasan mengenai masalah kementerian tersebut ditunda, kemudian presiden kembali membahas masalah tentara kebangsaan. Panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar di Nata mengusulkan:

1. Rencana pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang mengandung politik peperangan tidak dapat diterima;
2. PETA di Jawa, Lasykar Rakyat di Sumatera, PETA di Bali dibubarkan, karena organisasi itu organisasi buatan Jepang. Negara Indonesia membutuhkan alat pertahanan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu diusulkan agar supaya Presiden memanggil pemuka-pemuka yang mempunyai kecakapan militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh.

Usul Panitia Kecil tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang. Masalah kepolisian oleh Panitia Kecil dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk mempersiapkan masalah tentara kebangsaan dan kepolisian hendaknya presiden menunjuk orangnya. Hal ini disetujui oleh sidang, dan kemudian presiden menunjuk Abdul Kadir, Kasman dan Oto Iskandar di Nata, untuk mempersiapkan pembentukannya. Rapat pada siang hari tanggal 19 Agustus 1945 itu ditutup pada pukul 14.55.

Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 itu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Oto Iskandardi Nata, Sukardjo Wirjopranoto, Dr. Buntaran, Mr. A. G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dr. Tajudin berkumpul di Jalan Gambir Selatan nomor 10 (sekarang Jalan Merdeka Selatan) untuk membahas personalia yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Telah disepakati bahwa anggota KNIP berjumlah 60 orang. Rapat KNIP pertama direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 malam, bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos Jakarta.

Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilanjutkan kembali tanggal 22 Agustus 1945. Dalam rapat itu diputuskan pula tiga masalah pokok yang pernah dibahas di dalam rapat-rapat sebelumnya yaitu dibentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Setelah menyelesaikan sidang-sidang selama lima hari berturut-turut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menganggap tugas-tugasnya telah selesai, maka pada hari itu juga yakni tanggal 22 Agustus 1945 badan itu dibubarkan oleh ketuanya. Dengan dibubarkannya PPKI tersebut, selesai pulalah tugas I Gusti Ketut Pudja mewakili Sunda Kecil. Pada tanggal 22 Agustus 1945 presiden RI mengangkat dan menetapkan Mr. I Gusti Ketut Pudja sebagai gubernur Sunda Kecil RI pertama dengan tugas untuk menyelenggarakan segala keputusan yang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita lain yang telah dilahirkan dalam sidang tersebut.

BAB III GUBERNUR SUNDA KECIL RI PERTAMA

Setelah ditetapkan sebagai gubernur Sunda Kecil, I Gusti Ketut Pudja kembali ke Bali pada tanggal 23 Agustus 1945. Kedatangannya membawa berita kepastian mengenai Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Di samping itu ia membawa mandat pengangkatan Ida Bagus Putra Manuaba sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk Sunda Kecil.

Sebagai gubernur Sunda Kecil, ia mulai membentuk pemerintahan yang dinamakan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia. Untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, gubernur membentuk Badan Pekerja yang anggotanya antara lain terdiri atas Dr. Moh. Angsar, I Gusti Bagus Oka dan Ida Bagus Putra Manuaba. Ibukota Provinsi Sunda Kecil ditetapkan di Singaraja.

Di samping Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil, Pemerintahan Pendudukan Jepang di Sunda Kecil masih tetap berkuasa. Di lain pihak masih ada daerah swapraja yang sejak tahun 1938 diatur oleh Pemerintahan Kolonial. Waktu itu ada delapan daerah swapraja yang diberi nama *landschappen*, yaitu Buleleng, Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Badung dan Karangsasem. Masing-masing *landschap* itu dikepalai oleh seorang raja. Pada zaman pemerintahan pendu-

dukan Jepang, swapraja-swapraja tersebut masih tetap dipertahankan.

Setelah terbentuknya Pemerintahan Nasional RI, susunan pemerintahan daerah di Bali belum mengalami perubahan. Pembenahan di bidang pemerintahan belum banyak dilakukan, tidak ada instruksi yang jelas dari Pusat, terutama mengenai kedudukan swapraja-swapraja tersebut. Hal itu masih ditambah lagi dengan adanya kesulitan dalam menghadapi Pemerintahan Pendudukan Jepang yang kenyataannya masih berkuasa. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ida Bagus Putra Manuaba diutus ke Jakarta pada tanggal 24 September 1945.

Ternyata I.B.P. Manuaba tidak membawa instruksi baru dari Jakarta. Pemerintah Pusat RI telah menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerahlah yang harus menyelesaikan atau mengatasi kesulitan yang dihadapi di daerahnya masing-masing.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Ketut Pudja didukung para pemuda menuntut Pemerintah Pendudukan Jepang yang berkedudukan di Singaraja agar memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bendera Jepang yang dikibarkan di kantor-kantor agar diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih;
2. Pemakaian waktu Jepang diganti dengan pemakaian waktu Indonesia;
3. Suasana perang seperti pembatasan jam malam, pemadaman lampu dan sebagainya supaya dicabut, dan
4. Pengambilalihan tenaga administrasi oleh bangsa Indonesia sendiri.

Demikianlah bunyi tuntutan pertama yang diajukan oleh Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil kepada pihak Jepang. Tuntutan tersebut ditolak oleh pihak Jepang. Penolakan Jepang tersebut menimbulkan kebencian di kalangan pemuda, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, sebab anggota PETA tidak bersenjata lagi, sedangkan organisasi pemuda belum tersusun rapi untuk mengadakan perlawanan.

Bersamaan dengan pembentukan KNI di tingkat provinsi dan kabupaten, dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat (BKR). Gubernur Ketut Pudja memberi perintah kepada I Made Putu bekas *daidanco* (komandan batalyon) PETA untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat. Demikianlah, pada tanggal 31 Agustus 1945 diresmikan berdirinya Badan Keamanan Rakyat Bali di bawah pimpinan I Made Putu di Singaraja.

Untuk menyatukan kedelapan raja ke dalam kesatuan bangsa, Gubernur Ketut Pudja bersama dengan I.B.P. Manuaba mengadakan perjalanan keliling daerah Bali. Ia singgah di tiap-tiap kerajaan untuk memberi penerangan kepada raja-raja dan rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Pemerintahan Nasional RI di Sunda Kecil. Ia juga mengirim utusan ke Lombok dan Sumbawa Besar untuk tujuan yang sama.

Pihak pemuda juga tidak tinggal diam. Di Denpasar lahir organisasi pemuda dengan nama Pemuda Republik Indonesia (PRI). Pada waktu yang bersamaan di Singaraja lahir pula organisasi pemuda yaitu Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO). Kedua organisasi pemuda ini mempunyai tujuan yang sama yaitu membela serta mempertahankan Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Kedua organisasi pemuda ini dengan cepat mempunyai pengaruh besar dalam kalangan pemuda dan rakyat.

Kesibukan-kesibukan para pemuda revolusioner ini terjadi secara serentak dan merata. Serombongan pemuda berhari-hari tinggal di pantai Sanur dan Babean buleleng dan Gilimanuk menjaga penyelundupan dari luar Pulau Bali. Serombongan lain menyeberangi Selat Bali ke Jawa untuk mencari kontak dengan pemuda-pemuda revolusioner di sana. Serombongan lain memperhatikan gerak-gerik orang Jepang yang masih berkeliaran di jalan-jalan. Serombongan lain berhari-hari memberi penerangan, membangkitkan semangat rakyat. Serombongan lain membicarakan segala macam rencana, serombongan lain sibuk mempersiapan senjata tajam. Se-

mua kegiatan pemuda itu ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa dari penjajahan asing.

Setelah Gubernur Ketut Pudja dan I.B.P. Manuaba kembali dari perjalanan keliling daerah Bali, Komandan BKR Bali I Made Putu datang menghadap. Dalam kesempatan itu I Made Putu melaporkan tentang kebulatan tekad para pemuda dan rakyat Bali untuk bertindak tegas terhadap Pemerintah Pendudukan Jepang. Komandan BKR I Made Putu mengusulkan agar sekali lagi memberikan ultimatum kepada Pemerintah Pendudukan Jepang.

Gubernur Ketut Pudja beserta semua kepala jawatan di Provinsi Sunda Kecil sepakat untuk menuntut Jepang agar kekuasaan diserahkan kepada gubernur Sunda Kecil. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka keamanan tidak akan terjamin lagi, sedangkan pejabat pemerintahan nasional RI setempat akan segera melakukan pemogokan.

Setelah persiapan-persiapan ke arah ini selesai, Gubernur Ketut Pudja dan I.B.P. Manuaba serta beberapa kepala jawatan setempat menuju tempat kediaman *cookan* untuk menyampaikan ultimatum tersebut. Para pemuda dan rakyat berbondong-bondong mengiringi Gubernur Ketut Pudja dari belakang. Mereka membawa bendera Merah Putih serta bersorak-sorak memekikkan "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Semakin dekat ke tempat kediaman *cookan,* semakin ramai rakyat mengiringi dan semakin riuh pekikan mereka.

Selaku kepala pemerintahan nasional, Gubernur Ketut Pudja mendesak *cookan* agar menyerahkan kekuasaan secara damai kepada bangsa Indonesia. Pemerintah daerah Sunda Kecillah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Sunda Kecil. Gubernur beserta stafnyalah yang mengatur pemerintahan sipil di Provinsi Sunda Kecil.

Tuntutan kali ini disertai dengan ultimatum, apabila tidak dipenuhi, gubernur dan stafnya akan menyerahkan kembali tanggung jawabnya kepada rakyat. Gubernur tidak mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi sesudahnya.

Untuk membicarakan masalah tersebut dengan pembesar Jepang lainnya, *cookan* minta waktu penundaan selama lima hari. Setelah berunding beberapa lama, gubernur menyetujui penundaan tersebut, tetapi waktunya bukan lima hari, melainkan dua hari.

Penundaan jawaban pihak Jepang ini menimbulkan kemarahan di pihak pemuda dan rakyat. Dengan dipelopori pemuda yang tergabung dalam PRI, PESINDO, BKR dan pemuda-pemuda lainnya, mereka bersiap-siap untuk berontak dan berteriak-teriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Namun Gubernur Ketut Pudja berhasil menenangkan mereka. Demikianlah para pemuda dan rakyat pulang kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Mereka menyiapkan suatu massa yang lebih besar untuk memperkuat ultimatum tersebut.

Tanggal 8 Oktober 1945, adalah hari yang telah ditetapkan untuk menerima jawaban dari pihak Jepang. Pemuda-pemuda bersama rakyat secara serentak berbaris menuju ke tempat kediaman *cookan*. Mereka berbaris secara teratur, sambil mengibar-ngibarkan bendera Merah Putih serta bersorak-sorak memekikkan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Pemuda-pemuda yang telah terlatih sudah bersiap-siap dengan bambu runcing dan senjata tajam lainnya, bergerak maju mengepung tempat kediaman *cookan*, kepala Pemerintah Pendudukan Jepang itu.

Demonstrasi ini makin meluap-luap. Tidak sedikit para pemuda dan rakyat dari luar kota datang memperkuat tuntutan tersebut. Dengan gemuruh mereka bersorak-sorak, memekikkan semboyan-semboyan yang membangkitkan perasaan dan semangat meluap-luap.

Para pembesar militer Jepang mengerti dan menyadari apa artinya tuntutan massa rakyat yang sedang berdiri di hadapan mereka, karena itu mereka terpaksa menyetujui perjanjian penyerahan kekuasaan kepada Gubernur Ketut Pudja, sebagai kepala Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil.

Demikianlah penyerahan kekuasaan ini berlangsung secara damai. Acara serah-terima kekuasaan berjalan dengan lancar. Dengan penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pendudukan Jepang itu, gubernurlah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Sunda Kecil. Para pemuda dan massa rakyat kembali ke tempat masing-masing dengan perasaan puas dan gembira.

Orang-orang Jepang baik tentara maupun pegawai sipil dan orang Jepang yang bekerja di perusahaan, semuanya dikumpulkan ke tempat-tempat yang disediakan bagi mereka. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak dikehendaki, mereka pun bersedia berdiam di tempat-tempat tersebut. Pemerintahan Nasional RI setempat tetap menjamin bahan makanan dan keperluan mereka sambil menunggu penyelesaian bagi mereka selanjutnya.

Sementara Gubernur Ketut Pudja sedang melengkapi susunan organisasi dan personalianya, terjadilah suatu insiden di Pelabuhan Buleleng. Peristiwa ini diawali dengan berlabuhnya sebuah kapal Belanda yang bernama *Abraham Grijns* di Pelabuhan Buleleng, Singaraja pada tanggal 25 Oktober 1945. Para awak kapal turun ke darat dengan senjata lengkap. Setelah berputar-putar di pelabuhan, mereka memeriksa barang-barang yang ada di pelabuhan. Barang-barang berupa berkarung-karung beras, tepung, mereka rampas dan mereka angkut ke kapal. Demikianlah sampai senja hari, mereka merampok sepuas-puasnya. Mereka kembali ke kapal setelah hari menjelang magrib.

Hari kedua, mereka turun lagi ke darat dan berputar-putar sekitar pelabuhan. Tiga buah kapal kayu milik Pemerintah Indonesia dengan bendera Merah Putih berkibar di tiangnya, diseret awak kapal Abraham Grijns. Sang Merah Putih direnggut dari tiangnya. Bendera Sang Merah Putih telah dihina oleh awak kapal Belanda tersebut.

Pada hari ketiga datanglah berbondong-bondong para pemuda dari Bali Selatan. Mereka datang dengan sukarela ke

Kota Singaraja untuk menunjukkan solidaritas setelah mendengar Sang Merah Putih yang sedang berkibar direnggut Belanda. Mereka datang menyediakan jiwa dan raga, demi kehormatan Sang Dwiwarna. Mereka siap sedia menghadapi awak kapal Abraham Grijns.

Demikianlah pada hari ketiga itu awak kapal Abraham Grijns, turun ke darat, mereka bersenjata lengkap, terus masuk kota. Mereka mulai mengadakan provokasi. Bendera Merah Putih yang sedang berkibar di depan kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah penduduk mereka turunkan. Beberapa orang di kantor pemerintah ditangkap dan dibawa ke kapal kemudian dilepaskan kembali.

Beberapa awak kapal Abraham Grijns ini mengadakan hubungan dengan orang-orang Jepang yang ada di Kota Singaraja. Ternyata Jepang hendak diperalat oleh Belanda untuk menekan hasrat dan semangat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Menjelang senja hari, awak kapal kembali ke kapal. Bendera Merah Putih yang berkibar di pelabuhan di depan Kantor Bea Cukai diturunkan dan diganti dengan bendera Belanda. Bendera Merah Putih mereka koyak-koyak, tindakan mereka itu menyayat hati rakyat di Bali.

Para pemuda bersiap membalas sakit hati mereka kepada Belanda. Berbondong-bondong mereka berangkat menuju pelabuhan untuk mengadakan penyerbuan secara gerilya, di bawah pimpinan I Made Putu. Sesampai mereka di pelabuhan, ternyata awak kapal Abraham Grijns sudah naik kapal semuanya.

I Made Putu memerintahkan anak buahnya Anang Ramli untuk menurunkan bendera Belanda dan menggantikan dengan bendera Merah Putih. Dengan merayap Anang Ramli berhasil mendekati tiang bendera dan menurunkan bendera Belanda serta menggantinya dengan bendera Merah Putih. Melihat bendera Merah Putih berkibar kembali di Pelabuhan Buleleng, pihak Belanda menembaki dari kapal. Tembakan-tembakan Be-

landa tersebut tepat mengenai I Made Merta, sehingga tewas seketika. Keesokan harinya kapal Abraham Grijns berlayar meninggalkan Pelabuhan Buleleng.

Dengan keluarnya maklumat Pemerintah nomor 2/X tanggal 5 Oktober tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Gubernur Ketut Pudja mengadakan rapat di Denpasar. Hadir dalam rapat tersebut ketua KNI Sunda Kecil dan pimpinan daerah serta raja-raja di Bali. Rapat itu membicarakan mengenai pembentukan TKR. Dalam rapat itu telah disepakati agar masing-masing daerah mengirimkan wakilnya yang memiliki ketrampilan militer.

Rapat pembentukan TKR dilaksanakan tanggal 30 Oktober 1945, bertempat di kantor KNI daerah Badung, di Denpasar. Hadir dalam rapat itu dari daerah Buleleng diwakili oleh I Gusti Made Agung, daerah Jembrana diwakili oleh I Gusti Agung Bagus Kayun, daerah Tabanan diwakili oleh I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Wayan Debes, daerah Badung diwakili oleh I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Putu Wisnu, daerah Gianyar diwakili oleh I Dewa Gede Anom Asta, daerah Bangli diwakili oleh Anak Agung Anom Mudita dan daerah Karangasem diwakili oleh Anak Agung Gede Karang dan Anak Agung Ketut Karang, sedangkan daerah Klungkung tidak mengirim utusan.

Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa markas TKR Sunda-Kecil berkedudukan di Denpasar. Kemudian pertemuan dilanjutkan tanggal 1 Nopember 1945, antara TKR dan pimpinan-pimpinan organisasi. Dalam pertemuan hadir pimpinan TKR, pimpinan Badan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), pamong praja, Polisi Umum dan KNI daerah Badung. Dalam pertemuan itu I Gusti Ngurah Rai terpilih sebagai pimpinan TKR untuk Provinsi Sunda Kecil, dengan anggota stafnya ialah I Gusti Putu Wisnu dan I Wayan Ledang.

Sejak "peristiwa bendera" di Pelabuhan Buleleng, situasi di daerah Bali semakin gawat. Persoalan dengan Jepang belum selesai, sudah harus menghadapi pihak Sekutu. Sikap orang Jepang dan provokasi yang dilontarkannya memancing insiden antara para pemuda dengan pihak Jepang; karena itu pimpinan

TKR segera mengadakan rapat untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di Bali.

Rapat diadakan tanggal 8 Desember 1945 di markas TKR Denpasar. Hadir dalam rapat tersebut antara lain pimpinan TKR, pimpinan Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan pimpinan Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO). Dalam rapat itu telah diambil keputusan bulat untuk merebut senjata Jepang. Rapat dilanjutkan lagi di Denpasar tanggal 11 Desember 1945 di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai untuk mematangkan rencana penyerbuan ke tangsi-tangsi tentara Jepang. Penyerangan akan dilakukan secara serentak di seluruh daerah Bali pada tanggal 13 Desember 1945 waktu tengah malam.

Pada hari yang telah ditetapkan, yakni tanggal 13 Desember 1945, sejak sore hari para pemuda telah bersiap-siap membuat bambu runcing, mengasah golok, tombak dan lain-lain. Sebelum tengah malam, masing-masing regu berangkat menuju ke tangsi tentara Jepang, sesuai dengan perintah dari komandan regu masing-masing. Mereka merapat ke pagar kawat berduri tangsi tersebut. Tepat tengah malam, perintah menyerang diteriakkan dengan lantang. "Tontongan" di Pura Dalem dan Pura Puseh serta pura yang ada di Bale-Bale Banjar dipukul bertalu-talu. Tembakan mulai terdengar bertubi-tubi. Tembakan karaben dan mitraliur dari pihak Jepang menyembur ke udara. Rupanya mereka telah mengetahui rencana penyerbuan tersebut.[31]

Kegagalan penyerbuan ke tangsi-tangsi Jepang, ternyata membawa akibat yang sangat merugikan perkembangan perjuangan di Sunda Kecil umumnya dan di Bali khususnya. Setelah peristiwa malam penyerbuan itu, keesokan harinya orang-orang Jepang yang sudah dimasukkan ke dalam tangsi-tangsi, keluar lagi ke jalan-jalan dengan membawa senjata berat dan lengkap. Pagi-pagi buta mereka telah mengepung tempat para pemuda TKR, PRI dan PESINDO.

Pagi itu tentara Jepang mulai melaksanakan serangan balasan. Tembak-menembak berlangsung di dalam Kota Singa-

raja selama beberapa jam. juga di kota-kota Tabanan, Denpasar dan Negara. Jepang terus mengadakan pengejaran terutama terhadap anggota TKR.

Setelah dikepung selama dua hari, tertangkaplah pimpinan PESINDO Gede Puger bersaama anggota stafnya I Gusti Bagus Widjaka tidak jauh dari perbatasan Kota Singaraja. Mereka digiring ke tangsi Jepang di Banyumala. Tentara Jepang terus bergerak menangkapi para pemuda yang diduga terlibat dalam gerakan penyerbuan tersebut.

Pimpinan TKR yang menyadari posisinya terdesak, memerintahkan para pemuda mundur ke luar kota. Para pemuda yang bertahan di Kota Singaraja mendapat perintah mundur ke Desa Bakung dan terus ke Pegayaman. Sedang para pemuda yang bertahan di Kota Denpasar mundur dari Puri Satria ke Puri Kesiman.

Sementara itu para pimpinan Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil juga diculik oleh Jepang. Mereka tersebut antara lain Gubernur Ketut Pudja, Ketua KNI Ida Bagus Putra Manuaba dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Mereka dibawa dalam truk ke Denpasar dan ditahan di Hotel Bali. Mereka tidak diperbolehkan bicara satu sama lain dan ditahan di kamar yang terpisah-pisah.

Dalam keadaan terkepung di Puri Kesiman, mereka bertekad untuk meneruskan perjuangan. Mereka berkesimpulan bahwa gagalnya penyerbuan bukan karena tidak berani melawan Jepang, melainkan karena persenjataan yang kurang. Pihak TKR di bawah pimpinan Ngurah Rai berkesimpulan bahwa penyerbuan untuk merebut senjata Jepang hanya merupakan tindakan permulaan. Pertempuran yang akan datang melawan penjajahanlah yang harus diperhitungkan, sebab pemerintahan Hindia Belanda pasti ingin kembali. Hal ini selayaknya dijadikan titik pertimbangan utama. Maka sebelumnya harus diadakan latihan kemiliteran dan perjuangan menyeluruh.

Untuk memperkuat pertahanan, mereka harus mendapatkan senjata. Satu-satunya jalan adalah menghubungi Pemerin-

tah RI pusat di Yogyakarta dan melaporkan keadaan perjuangan di daerah Bali khususnya dan daerah Sunda Kecil umumnya. Rombongan berangkat ke Jawa tanggal 19 Desember 1945 dipimpin oleh Ngurah Rai, I Wayan Ledang dan Cokorda Ngurah. Sebelum berangkat, dibentuk suatu staf gerilya di Bali yang bertanggung jawab untuk meneruskan perang selama Ngurah Rai berada di Jawa. Tanggung jawab tersebut diserahkan kepada I Gusti Wayan Debes dan I Made Widjakusuma.

Jepang menculik dan menahan pimpinan Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil, dengan alasan untuk melindungi orang-orang Jepang. Tetapi kenyataannya tindakan Jepang tersebut adalah untuk merobohkan kekuasaan Pemerintahan Nasional RI yang baru didirikan. Di samping itu Jepang mulai mendekati raja-raja dengan membangkit-bangkitkan kekuasaan *zelfbestuurder* yang dulu dibangun oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Dengan demikian secara tidak langsung Jepang membujuk para raja di Bali agar mengambil alih kekuasaan yang sudah terlanjur diserahkannya kepada Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil.

Dalam tipu dayanya, Jepang telah berhasil membentuk suatu majelis yang terdiri ats raja-raja dengan nama *"Dewan Raja-Raja"*. "Dewan Raja-Raja" tersebut merupakan badan eksekutif dan badan pelaksana dalam memberikan tugas kepada masing-masing raja di dalam wilayahnya. Dilihat dari struktur pemerintahannya "Dewan Raja-Raja" membawahi beberapa kepala jawatan, antara lain Pengairan, Pembangunan, Lalu-lintas, Pajak bumi, Peternakan, Kesehatan, Pengajaran, Pertanian dan Kepolisian.

Pada tanggal 21 Januari 1946, Jepang mengorganisasi suatu rapat gabungan antara "Dewan Raja-Raja" dengan pihak Komite Nasional Indonesia. Demikianlah, agar Ida Bagus Putra Manuaba (ketua KNI Sunda Kecil) dapat memimpin rapat gabungan itu, para pemimpin Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil yang ditahan mereka bebaskan sehari sebelumnya. Dengan demikian Ketua KNI beserta anggota lainnya dihadap-

kan dengan suatu keadaan *fait accompli*. Mereka tidak dapat mengelak kecuali menerima apa yang telah disodorkan di hadapan mereka.

Dengan demikian Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, kecuali pemerintahan kerajaanlah yang dapat berjalan di bawah raja mereka. Sementara itu Jepang sering mengadakan rapat-rapat dengan "Dewan Raja-Raja" tanpa sepengetahuan kepala Pemerintah Nasional RI Sunda Kecil.

Kedatangan kapal Belanda di Buleleng, Singaraja, bulan Oktober 1945 yang mengakibatkan terjadi "peristiwa bendera" di Pelabuhan, merupakan kenyataan bahwa kapten kapal telah mengadakan hubungan dengan pihak Jepang. Disusul lagi dengan mendaratnya beberapa awak kapal *Heemskerk*, yang segera pula mengadakan hubungan dengan pihak Jepang.

Bertepatan dengan mendaratnya orang-orang dari Kapal Heemskerk tersebut, beberapa pimpinan Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil diculik lagi oleh tentara Jepang. Mereka yang diculik ialah Gubernur Ketut Pudja, Ketua KNI I.B.P. Manuaba dan beberapa kepala jawatan. Mereka ditahan di tangsi Banyumala. Alasan penculikan ialah untuk melindungi para pemimpin Nasional RI, karena adanya pendaratan tiga ribu teror dari Jawa. Alasan itu hanyalah buatan Jepang saja, dengan maksud mencari dalih agar dapat menahan para pemimpin RI.

Sementara para pimpinan Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil masih dalam tahanan di tangsi tentara Banyumala, kapal Heemskerk berlabuh lagi di Pelabuhan Buleleng, di bawah pimpinan Kapten Van Gulick tanggal 15 Februari 1946. Menurut berita, kedatangan Kapten Van Gulick tersebut bermaksud memaksakan kehendaknya kepada para pimpinan Pemerintahan Nasional RI yang ditahan untuk menyerahkan kembali kekuasaan.

Untunglah ombak pantai utara Bali pada saat itu sangat besar, sehingga Kapten Van Gulick tidak dapat mendarat.

Memang setiap bulan Februari ombak pantai utara Bali sangat besar, sehingga sering terjadi tabrakan kapal dan banyak juga kapal yang kandas di pantai. Setelah mondar-mandir beberapa kali di depan Pelabuhan Buleleng, kapal Heemskerk berlayar meninggalkan Bali. Pada keesokan harinya Gubernur Ketut Pudja, I.B.P. Manuaba dan kepala jawatan lainnya dibebaskan kembali oleh Jepang.

Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Februari 1946 berlabuhlah beberapa kapal di sebelah selatan Pulau Serangan, di depan Pelabuhan Benoa. Para pemuda pejuang telah siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Mereka menduga yang datang itu tentulah kapal-kapal Belanda. Ternyata kapal-kapal tersebut kepunyaan Sekutu.

Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia ini merupakan komando bawahan dengan tiga divisi dari *South East Asia Command* (SEAC) yang diberi nama *Alied Forces Nederlands East Indies* (AFNEI). Tugas AFNEI di Indonesia adalah melaksanakan perintah gabungan kepala staf Sekutu yang diberikan kepada SEAC, di antaranya ialah:

1. menerima penyerahan dari tangan Jepang;
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu;
3. melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;
4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil; dan
5. menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan Sekutu.

Sebagai tuan rumah, Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil berhak mengetahui keperluan tamu yang berkunjung dan membantu keperluan mereka. Tetapi Jepang telah mendahului mengadakan hubungan dengan pihak Sekutu. Namun demikian Gubernur Ketut Pudja tetap berusaha mengadakan hubungan dengan pimpinan rombongan Sekutu tersebut.

Kedatangan Sekutu disambut dengan baik oleh Gubernur Ketut Pudja. Dalam pertemuan itu pihak Sekutu telah menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke Bali. Kepada pihak Sekutu dijelaskan pula bahwa di Sunda Kecil telah berdiri Pemerintahan Nasional Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernurlah yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Sunda Kecil.

Dalam pada itu Gubernur Ketut Pudja mengemukakan usul agar tentara Sekutu tidak mendaratkan tentara Belanda di Pulau Bali. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan di hari-hari mendatang. Usul gubernur disanggupi oleh Mayor Husein pimpinan tentara Sekutu. Ia berjanji akan mendaratkan tentara Inggeris dan Australia di Sunda Kecil.

Pagi hari tanggal 2 Maret 1946, kapal *Gajah Merah* mendarat di Pantai Sanur. Tidak kurang dari 150 truk dan jip dengan berbagai peralatan militer serba lengkap dan modern bergerak menuju Denpasar. Mereka yang datang itu merupakan satu kesatuan alat pemerintahan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration* = Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Kesatuan ini adalah satu resimen di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri F.H. ter Meulen.

Dengan persenjataan serba lengkap dan modern, awak kapal Gajah Merah segera menduduki Kota Denpasar menggantikan kedudukan tentara Sekutu yang telah berada di Bali sejak 18 Februari 1946. Pada keesokan harinya awak kapal Gajah Merah menuju Kota Gianyar. Mereka menduduki Gianyar tanggal 3 Maret 1946 dengan mendapat sambutan hangat dari Raja Gianyar, Anak Agung Gde Agung. Singaraja mereka duduki tanggal 5 Maret 1946, Tabanan tanggal 7 Maret 1946 dan Negara tanggal 19 Maret 1946.

Setelah tiba di Singaraja, ibukota Provinsi Sunda Kecil, para pembesar AFNEI ingin bertemu dengan kepala Pemerintahan Nasional RI yaitu Gubernur Ktut Pudja beserta stafnya. Mereka diterima dan segera mengadakan pertemuan di Kantor

Kepala Daerah Buleleng. Dari pihak Indonesia hadir Gubernur Ktut Pudja, Ida Bagus Manuaba, Mr. A. Ngurah Djelantik, Nyoman Kadjeng, Dr. Moh. Angsar, Gusti Bagus Oka dan Soewarno S.D. Sedang dari pihak pembesar AFNEI Van Beuge dan seorang pengiringnya.

Pertemuan tidak resmi tersebut diadakan untuk menghindari adanya salah faham antara masyarakat dengan tentara Sekutu yang datang ke Bali. Maksud kedatangan tentara Sekutu ini adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang, mengurus tawanan perang dan menjaga keamanan dan ketentraman umum. Pasukan-pasukan yang datang dengan kapal Gajah Merah terdiri atas orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel ter Meulen, yang membawa perintah Sekutu.

Pada sore harinya setelah pertemuan antara pembesar AFNEI dengan Gubernur Ktut Pudja, orang-orang NICA mulai memancing kerusuhan. Pada saat itu Gubernur Ktut Pudja sedang bermusyawarah dengan anggota stafnya, membicarakan masalah keamanan, kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Di Denpasar orang-orang NICA mulai memancing kerusuhan. Dengan paksa mereka menurunkan bendera Merah Putih.

Pada tanggal 11 Maret 1946, enam hari setelah pertemuan antara pembesar AFNEI dengan Gubernur Ktut Pudja, tiba-tiba tentara NICA mengepung tempat kediaman Gubernur Ktut Pudja. Pada waktu itu Ketua KNI I.B.P. Manuaba beserta kepala-kepala jawatan sedang berada di rumah Gubernur Ktut Pudja, membicarakan masalah rutin pemerintahan. Mereka dikepung dari segala penjuru oleh pasukan NICA dengan komandan Kapten Smith. Kapten Smith menahan gubernur, ketua KNI dan kepala Jawatan Pajak atas perintah Panglima Tentara Sekutu di Jawa Timur Mayor Jenderal E.C. Mansbergh. Alasan penahanan adalah karena ketertiban dan keamanan tidak terjamin, dan banyak terjadi pembunuhan di Sunda Kecil; dengan demikian berarti Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil tidak dapat mengendalikan keadaan.

Bersamaan dengan penangkapan pemimpin-pemimpin Pemerintahan Nasional RI Sunda Kecil, di daerah Gianyar situasi bergolak dengan sangat cepatnya. Barisan yang menamakan diri Pemuda Pembela Negara (PPN), suatu organisasi lokal yang semula bertujuan menjaga keamanan daerah Gianyar serta melindungi puri raja Gianyar, mendadak menyatakan bekerja sama dengan NICA di bawah pimpinan Anak Agung Gde Agung, Raja Gianyar. PPN bertindak menjadi pelopor tentara Belanda untuk menghancurkan setiap gerakan para pejuang.

Situasi bergolak tidak hanya di daerah Gianyar, tetapi juga di daerah Jembrana. Begitu Belanda masuk di Kota Negara, benih-benih pertentangan di antara beberapa keluarga dimanfaatkan oleh NICA sebagai alat untuk mengadu-domba dan melemahkan perjuangan para pemuda di daerah Jembrana. Dengan liciknya Belanda berhasil membujuk Gusti Bagus Westrautama, lalu membentuk organisasi anti perjuangan dengan nama Badan Pemberontak Pengacau (BPP). BPP menjelek-jelekkan para pejuang sebagai pengacau. BPP merendahkan perjuangan para pemuda dalam mempertahankan Republik Indonesia. BPP aktif menghancurkan setiap usaha para pemuda dari Jawa yang hendak mendarat di Pantai Bali sebelah barat.

Sementara itu pada tanggal 4 April 1946, rombongan I Gusti Ngurah Rai kembali dari Jawa. Mereka mendarat di Yeh Kuning di pantai daerah Jembrana, sebelah barat daya Pulau Bali. Ngurah Rai kembali dari Jawa sebagai pimpinan Tentara Republik Indonesia (TRI) Resimen Sunda Kecil dengan pangkat letnan kolonel. Dalam perjalanan, rombongan Ngurah Rai berhasil membentuk suatu Biro Penghubung Bali-Jawa yang berkedudukan di Banyuwangi. Selama di Jawa tidak banyak senjata yang dapat dikumpulkan, karena perjuangan di Jawa pun memerlukan banyak senjata. Namun demikian perjalanan Ngurah Rai tidaklah sia-sia, karena dengan terbentuknya Biro Penghubung Bali-Jawa di Banyuwangi, maka hubungan Bali-Jawa nantinya akan lancar.

Dewa Nyoman Djehen menyerahkan rumahnya untuk dipakai sebagai markas Ngurah Rai dan stafnya. Di rumah itulah para pimpinan pejuang berkumpul merundingkan segala sesuatunya mengenai langkah-langkah perjuangan selanjutnya. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk mengubah susunan organisasi perjuangan dengan mempersatukan seluruh organisasi perjuangan yang ada di Sunda Kecil dengan nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) yang dipimpin oleh Ngurah Rai.

Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia adalah penggabungan dari PRI dan PESINDO di satu pihak dan TRI Resimen Sunda Kecil di lain pihak. Anggota PRI dan PESINDO kemudian dimobilisasi dan digabungkan ke dalam kesatuan tentara Resimen Sunda Kecil di bawah komando Markas Besar Umum (MBU). Markas Besar yang ada di tiap-tiap daerah kerajaan menjadi Komando Lokal untuk menerima perintah dan instruksi dari Markas Besar. Umum (MBU) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ngurah Rai.

Anggota-anggota DPRI yang berasal dari berbagai organisasi tersebut kemudian diangkat menjadi anggota militer. Setelah reorganisasi ini, pembagian tugas diberikan dengan teratur. Mereka yang bertugas di Markas Besar (MB) di tiap daerah kerajaan berkewajiban memberi penerangan kepada rakyat, menggerakkan tenaga-tenaga pemuda revolusioner, membersihkan daerah dari kaki-tangan dan mata-mata musuh, mengusahakan perlengkapan dan bahan makanan bagi anggota pasukan bersenjata dan lain-lain.

Dengan politik *divide et impera*-nya Belanda berusaha merongrong dan melemahkan kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia dengan membentuk negara-negara boneka. Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook pada tanggal 15 Juli 1946 mengadakan suatu konperensi di Malino (sebelah tenggara Kota Makasar = Ujung Pandang). Konperensi itu langsung dipimpin oleh H.J. Van Mook dan hasil konperensi ini antara lain memutuskan:

1. Negara Indonesia nantinya harus berbentuk federasi;
2. Sebelum Negara Federal terbentuk, maka di dalam masa peralihan ini kedaulatan ada di tangan Belanda; dan
3. Negara Federal itu nantinya berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda.

Pada tingkat Pemerintahan Pusat RI di Jakarta terjadi pula kesibukan-kesibukan untuk berunding dengan Belanda. Perdana Menteri Sutan Syahrir berunding dengan Prof. Ir. Schermerhorn di Linggajati. Kesepakatan tercapai pda tanggal 15 Nopember 1946, yang antara lain berisi:

1. Belanda mengaku Republik Indonesia *de fakto* atas Jawa, Madura dan Sumatera;
2. Republik Indonesia bersedia menjadi
2. Republik Indonesia bersedia menjadi sebagian dari Negara Indonesia Serikat; dan
3. Akan ada Uni Indonesia–Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda.

Perjanjian Lingaajati tersebut tidak dapat dilepaskan dari Konperensi Malino pada tanggal 15 sampai dengan 25 Juli 1947, yang secara terang-terangan telah memecah belah Indonesdia. Menurut isi Perjanjian Linggajati, Sunda Kecil terlepas dari kekuasaan Republik Indonesia.

Konperensi Malino disusul dengan suatu konperensi yang akan diadakan di Kota Denpasar Bali. Untuk konperensi Denpasar itu, H.J. Van Mook telah mempunyai konsep yang telah disodorkan dalam Konperensi Malino yang lalu. Konperensi Denpasar itu direncanakan melahirkan sebuah negara dengan nama Negara Indonesia Timur (NIT).

Konperensi Denpasar tersebut merupakan bahaya besar bagi kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia; karena itu sebagai pimpinan tertinggi perjuangan di Bali khususnya dan Sunda Kecil umumnya, Letnan Kolonel Ngurah Rai tidak tinggal diam. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menggagalkan

Konperensi Denpasar dan juga pembentukan Negara Indonesia Timur.

Demikianlah selama MBU DPRI Sunda Kecil berada di Munduk Malang, telah terjadi beberapa kali perlawanan terhadap pasukan Belanda, baik berupa penyerangan, penghadangan maupun pertempuran-pertempuran seperti di Ringdikit, Pangkung Bangka, Bebetin dan serangan terhadap tangsi-tangsi NICA di Denpasar, Pos NICA di Karanganyar dan lain-lain.

Selanjutnya disusul pula dengan pertempuran di Sekumpul, penyerangan Pos NICA di Lampu, pertempuran di Bon, pertempuran di Pemuteran, pertempuran Pesagi, pertempuran tanah Aron dan lain-lain. Sekembalinya dari perjalanan Juni-Juli, direncanakan untuk mengadakan penyerbuan ke Tangsi Polisi di Tabanan.

Demikianlah pada tangal 18 Nopember 1946 dilaksanakan penyerbuan ke tangsi Polisi NICA di Tabanan. Serangan ini berhasil dengan baik. Sejumlah senjata dapat direbut, antara lain 40 pucuk karabijn, granat tangan, 10 peti peluru dan lain-lain. Dengan berhasilnya pasukan gerilya merebut senjata di Tabanan, pasukan Ngurah Rai bertambah kuat.

Kebobolan tangsi Polisi NICA di Tabanan tersebut membuat kemarahan di pihak Pemerintah Belanda, terutama Kapten J.B.T. Konig yang bertanggung jawab terhadap keamanan Bali dan selaku komandan tentara NICA di daerah Bali. Sejak tanggal 19 Nopember 1946, pihak NICA telah mengerahkan semua pasukan yang menempati pos-pos di tangsi Perean, Baha, Kediri, Tabanan, Penebel dan Jatiluwih. Dengan berjalan kaki mereka menuju Desa Marga dan menduduki desa-desa yang berada di sekitar Marga.

Pada malam hari tanggal 9 Nopember 1946, Ngurah Rai mendapat laporan bahwa keesokan harinya tentara NICA merencanakan pengurungan di Desa Adeng dan Pengembangan. Mendengar laporan itu Ngurah Rai segera memerintahkan seluruh pasukan pada tengah malam itu juga untuk pindah ke

Banjar Kelaci. Pasukan tersebut berjumlah 105 orang yang diberi nama Ciung Wanara.

Pada pagi harinya tanggal 20 Nopember 1946 tentara NICA sudah mulai menurunkan tentaranya di depan Pasar Marga dan terus mengadakan penggerebekan ke rumah-rumah penduduk di semua Banjar yang ada di Desa Marga. Selanjutnya para penduduk digiring untuk dikumpulkan di depan Pasar Marga dan dijaga oleh tentara NICA, karena dianggap membantu para pejuang.

Dalam keadaan sudah terkurung, Ngurah Rai memerintahkan semua pasukannya menuju sawah Uma Kaang yang terletak kurang lebih satu kilometer dari Desa Kelaci. Di selasela pohon jagung, kedelai, ketela rambat dan tembakau, pasukan Ciung Wanara menyebar di tegalan Uma Kaang untuk mengatur posisi menghadapi kurungan tentara NICA yang sudah menyebar dari arah barat, timur dan selatan.

Tentara NICA yang terdiri atas seluruh pasukan yang ada di Bali, ditambah lagi dengan bantuan pesawat udara Bomber yang didatangkan dari Makasar, mulai mengadakan pengepungan secara serentak. Demikianlah pertempuran sengit dimulai pukul 12.00 dengan sangat hebatnya. Pihak tentara NICA melakukan serangan dari dua arah, yaitu dari darat dan udara menghujani dengan mortir dan tembakan-tembakan dengan senjata otomasis lainnya. Karena jumlah pasukan dan persenjataan lebih lemah, maka pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ngurah Rai gugur satu demi satu sebagai kusuma bangsa. Pertempuran berlangsung sampai sore hari dengan memakan korban cukup banyak.

Gugurnya Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku komandan Resimen dan pimpinan MBU DPRI Sunda Kecil sangat menggemparkan seluruh masyarakat Bali. Di kalangan para pejuang yang masih hidup segera diadakan pertemuan di Desa Buahan untuk mengatasi keadaaan di Bali dan mengambil alih kepemimpinan Ngurah Rai untuk mengatur perjuangan lebih

lanjut. Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa pimpinan MBU DPRI Sunda Kecil diserahkan kepada Widja Kusuma.

Di lain pihak, usaha-usaha pemerintah kolonial di Bali untuk menghancurkan basis-basis perjuangan di desa-desa terus dilakukan dengan tindakan-tindakan di luar peri kemanusiaan. Siksaan-siksaan terhadap rakyat yang dicurigai terus dijalankan bahkan lebih kejam dari pada sebelumnya. Di samping tindakan-tindakan yang langsung menindas para pejuang dengan kekerasan senjata, di lain pihak pemerintah kolonial masih tetap menjalankan politik *devide et impera* untuk menanamkan kekuasaannya.

Konperensi Denpasar merupakan sidang lanjutan Konperensi Malino, yaitu keinginan Pemerintah Hindia Belanda untuk menyusun kembali wilayah Hindia Belanda dahulu ke dalam suatu bentuk ketatanegaraan baru yaitu bentuk negara perserikatan atau negara federasi.

Konperensi Denpasar diikuti oleh wakil-wakil dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia Timur pada masa penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia II. Bagi daerah-daerah yang keadaannya belum aman, Belanda menunjuk wakil dari daerah yang dapat diajak bekerja sama.

Menurut pasal 14 peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur (*staatblad* 1946 no. 143), Indonesia Timur terbagi atas 13 daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Sangihe-Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor dan pulau-pulau Flores, Sumbawa dan Sumba.

Konperensi Denpasar berlangsung dari tanggal 24 sampai 28 Desember 1946. Dalam Konperensi Denpasar, ada tiga hal pokok yang dihasilkan, yakni (1) Pembentukan Negara Indonesia Timur (2) Pembahasan Rencana Undang-undang Dasar NIT dan (3) Pemilihan Presiden NIT. Sebagai presiden Negara Indonesia Timur yang pertama ialah Cokorde Gde Raka Sukawati, dan sebagai perdana menteri terpilih Najamuddin Daeng

Malewa, serta Makasar ditetapkan sebagai ibukota Negara Indonesia Timur.

Dengan berdirinya Negara Indonesia Timur hasil Konperensi Denpasar, Sunda Kecil (Bali, Lombok, Timor dan pulau-pulau Flores, Sumbawa dan Sumba) termasuk salah satu negara bagiannya. Dengan demikian berakhirlah jabatan gubernur Sunda Kecil RI yang pertama.

PENUTUP

Setelah mengikuti riwayat hidup, karier serta pengabdian tokoh I Gusti Ketut Pudja ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ia adalah pejuang yang tidak pernah absen dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada Nusa dan bangsa.

I Gusti Ketut Pudja tidak pernah menentang arus perjuangan bangsanya. Pendiriannya tetap teguh, dan sampai akhir hayatnya mengabdi dan berdharmabakti kepada negara dan bangsa.

Untuk melihat secara keseluruhan bagaimana riwayat hidupnya, karier serta pengabdiannya terhadap nusa dan bangsa, di bawah ini akan disajikan gambaran kembali secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang ia lalui sejak lahir sampai wafat.

Lahir : Pada tanggal 19 Mei 1908 di Sukasada, Singaraja, Bali, sebagai putra kelima dari I Gusti Nyoman Raka dengan Jero Ratna Kusuma

Menikah : Awal Januari 1935 dengan I Gusti Ayu Made Mirah di Sukasada, Singaraja, Bali

Putra : 1. Drs. I Gusti Ngurah Arinton, lahir tanggal 29 Oktober 1935 di Singaraja, Bali

2. I Gusti Made Arinta, S.H. lahir tanggal 30 Mei 1937 di Denpasar, Bali
3. I Gusti Ayu Nyoman Arinti, lahir tanggal 19 Desember 1938 di Denpasar, Bali
4. I Gusti Ayu Ketut Karnini, lahir tanggal 19 Mei 1940 di Denpasar, Bali
5. I Gusti Ayu Ketut Karnina, lahir tanggal 19 Mei 1940 di Denpasar, Bali

Saudara kandung:

1. I Gusti Gede Jelantik, Bupati Buleleng I
2. I Gusti Made Tedja
3. I Gusti Nyoman Wirya
4. I Gusti Ayu Ningrat

Wafat : Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dalam usia 69 tahun. Dikebumikan di Sukasada, Singaraja, Bali. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 1985 dilaksanakan perabuannya dalam suatu upacara "Ngaben" di Singaraja.

Pendidikan :

1. Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Singaraja, Bali tamat pada tahun 1922
2. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Malang, tamat pada tahun 1926
3. Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung, tamat pada tahun 1929
4. Rechts Hoge School (RHS) di Jakarta, tamat tahun 1934.

Pekerjaan :

1. Januari 1935 menyumbangkan tenaganya secara suka rela di Kantor Resident Bali dan Lombok
2. Tahun 1936 ditempatkan di bagian Pengadilan Negeri yang pada masa itu di Bali disebut Raad van Kerta

3. Dari tanggal 27 Januari 1942 sampai dengan 21 Juli 1942 melakukan pekerjaan Redjikan Dairi, diangkat oleh Kapten Kanamura dari Angkatan Darat Jepang
4. Dari tanggal 22 Juli 1942 – Januari 1944 melaksanakan pekerjaan Giyosei Komon, diangkat oleh Syutjokan Ceram Minseibu
5. Dari Juli 1944 sampai awal kemerdekaan sebagai Giyosei Komon diangkat oleh Syutjokansyoo Sunda Meiseibu
6. Mulai tanggal 22 Agustus 1945 diangkat oleh Presiden RI sebagai Gubernur Sunda Kecil
7. Mulai 8 Juli 1947 dipekerjakan sebagai Pegawai Tinggi pada Kementerian Dalam Negeri. Diberi tugas kewajiban sebagai Wakil Kementerian Dalam Negeri dalam mengikuti jalannya pemerintahan di daerah-daerah
8. Mulai tanggal 20 Mei 1950 sampai Juli 1950 diangkat sebagai Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur
9. Dari tanggal 1 Agustus 1950 sampai 30 Nopember 1950, diangkat sebagai Anggota Panitya Penyelenggaraan Perubahan Tata Negara dan likwidasi Negara Indonesia Timur
10. Dari tanggal 1 Desember 1950, dipekerjakan kembali sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Jogyakarta
11. Mulai 15 April 1951, dipindahkan dari Jogyakarta ke Jakarta sebagai Gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dipekerjakan pada Kabinet Perdana Menteri
12. Mulai 1 Juli 1954, diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan
13. Dalam tahun 1957, menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas keuangan, yang waktu itu Ketuanya dijabat oleh Drs. A.K. Pringgodigdo

14. Mulai bulan September 1960 menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Jabatan tersebut dipangku beliau sampai beliau memasuki masa pensiun
15. Mulai tahun 1968, beliau memasuki masa pensiun. Oleh karena tenaga beliau masih dibutuhkan, kemudian diangkat kembali sebagai anggota Pengawas Keuangan Negara (PEKUNEG).

Atas semua jasa danpengabdian I Gusti Ketut Pudja, Pemerintah Republik Indonesia telah menghadiahkan dua tanda penghargaan, yaitu Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Satya Lencana Karya Satya Kelas II.

I Gusti Ketut Pudja telah berbuat, menyerahkan dharmabaktinya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Pengabdiannya ia lakukan tanpa pamrih. Besarnya pengabdian yang telah ia sumbangkan akan tercatat dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Adat istiadat Daerah Bali, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Adam Malik, Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta: Penerbit Wijaya, 1975.

Hatta, Mohammad, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta Tintamas, 1970.

Ktut Sudiri Panyarikan, Drs. Sh, I Gusti Ngurah Rai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Kansil, C.S.T, Drs. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dasar Falsafah Negara, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta 1978.

Ktut Tantri, Revolusi di Nusa Damai, terjemahan Mayor Abdul Bar Salim, Gunung Agung, Jakarta, 1965.

Kementerian Penerangan RI, Propinsi Sunda Kecil, 1953.

Mawarti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (Editor), Sejarah Nasional Indonesia VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982/1983.

Nyoman S. Pendit, Bali Berjuang, PT Gunung Agung, Jakarta, 1979.

Sutrisno Kutoyo, Prof. H. Muhammad Yamin, SH, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1981/1982.

Sejarah Daerah Bali, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1976/1977, naskah.

Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Bali, Proyek Inventarisasi Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1979/1980, naskah.

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977/1978.

Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983/1984.

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.

Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.

Sejarah Pendidikan Daerah Bali, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1984.

Nasution, A.H. DR, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Diplomasi sambil bertempur, Penerbit Angkasa, Bandung, 1977.

Yayasan Kebaktian Pejuang Daerah Bali, Album Bali Berjuang.

DAFTAR INFORMAN

1. Ny. I Gusti Ayu Made Mirah (Ny. I Gusti Ketut Pudja), 71 tahun, Jalan Latuharhary no. 9 Jakarta.
2. Drs. I Gusti Ngurah Arinton Pudja, putera I Gusti Ketut Pudja, 49 tahun, Jalan Latuharhary no. 9 Jakarta.
3. Ny. A.A.S.G. Rai Suniaty (Ny. I Gusti Ngurah Arinton), Jalan Latuharhary no. 9 Jakarta.
4. I Gusti Bagus Oka, 75 tahun, Bekas Residen Bali dan Lombok, Jalan Sudirman 25 Denpasar, Bali.
5. I Wayan Dangin, 69 tahun, Bekas Dewan Pemerintahan Bali, Jalan Mayjen Sutoyo no. 1 Denpasar, Bali.
6. I Nengah Wirta Tamu (Pak Tjilik), 67 tahun, Pensiunan Pegawai Kantor Gubernur Bali, Jalan Jempiring no. 10 Denpasar, Bali.
7. Ida Bagus Ketut Rurus, 71 tahun, Bekas Punggawa di Manggis, Pensiunan Sekretaris Gubernur Bali, Denpasar, Bali.
8. I Made Widjakusuma, 67 tahun, Bekas Pimpinan MBU DPRI Sunda Kecil, Jalan Nangka, Denpasar, Bali.
9. A.A. Gde Ngurah Suryaningrat, 60 tahun, Pensiunan Pegawai Kantor Gubernur Bali, Jalan Banjar Kelandis Denpasar, Bali.
10. Dr. A. Halim, 75 tahun, teman baik Mr. I Gusti Ketut Pudja, Jalan Bandung no. 3 Jakarta.

Lampiran 1.

Djakarta, 22 – 8 – 2605 (1945).

Saja, Ir. Soekarno, Pemimpin Besar bangsa Indonesia,

I. mengangkat sebagai Wakil diseloeroeh daerah
   a. Sumatra
   b. Borneo
   c. Selebes
   d. Sunda-Ketjil
   e. Malukoe

   bertoeroet2

   a. tn. Mr. Teukoe Hasan
   b. tn. Ir. Pangeran Mohd. Noor
   c. tn. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie
   d. tn. Mr. I Goesti Ketoet Poedja
   e. tn. Mr. J. Latuharhari,

II. mewadjibkan beliau serta memberikannja koeasa oentoek menjelenggarakan segala kepoetoesan jang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan oentoek mewoedjoedkan tjita2 jang lain, jang telah dilahirkan dalam sidang terseboet.

Pemimpin Besar Bangsa Indonesia

Kepada
Jang terhormat
P.T. Mr. I Goesti Ketoet Poedja
SINGARADJA

Lampiran : 2

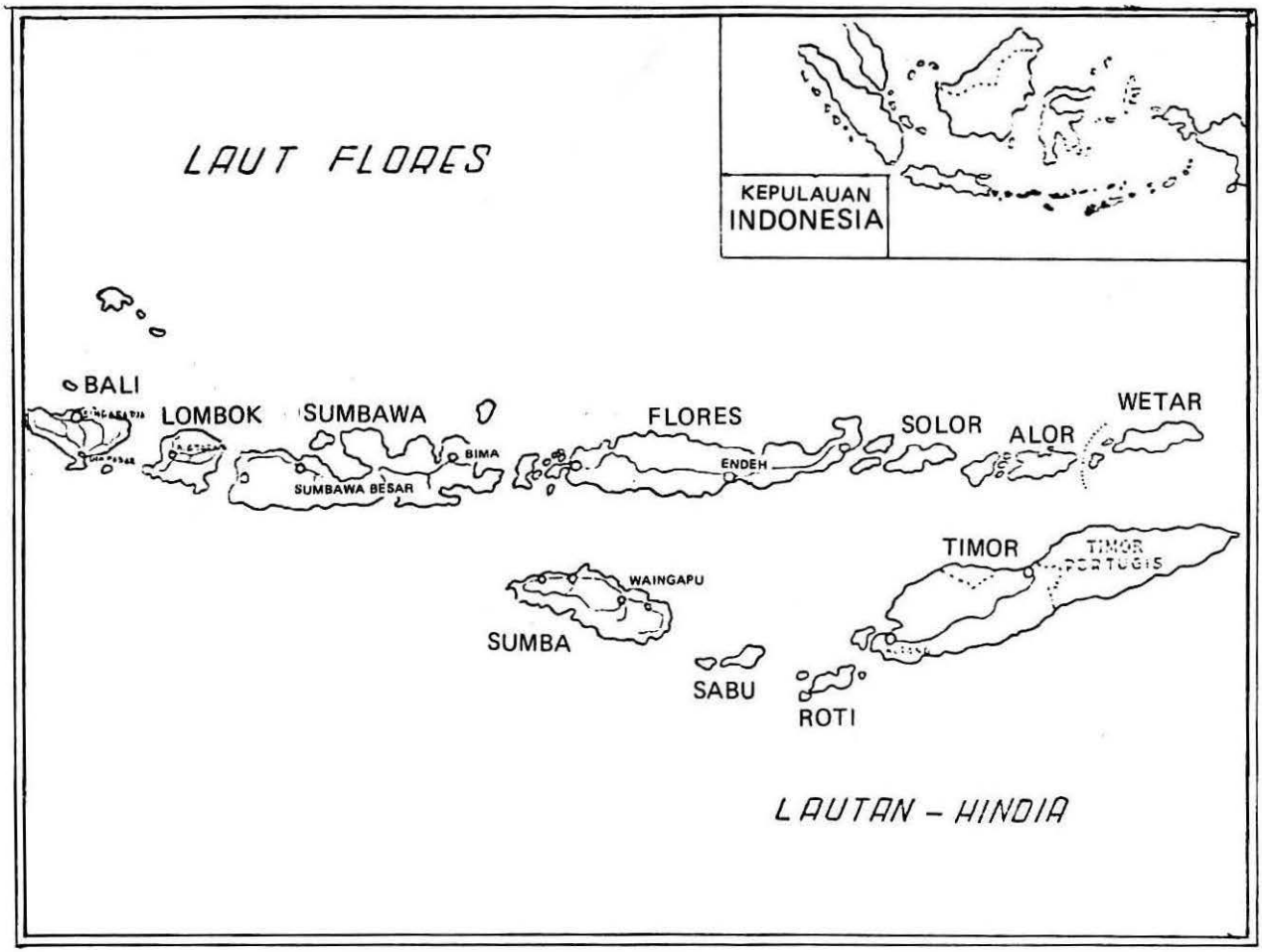

PROPINSI SUNDA KETJIL

Mr. I Gusti Ketut Pudja bersama isteri I Gusti Ayu Made Mirah dalam pakaian tradisional Bali

I Gusti Nyoman Raka, ayahanda Mr. I Gusti Ketut Pudja

Jero Ratna Kusuma, ibunda Mr. I Gusti Ketut Pudja

Mr. I Gusti Ketut Pudja, disambut hangat di Ibu Kota RI Jogyakarta

Perpus
Jende